

**PENGARUH KUALITAS APARATUR DAERAH, REGULASI BARANG MILIK DAERAH, PENGENDALIAN INTERNAL, KOMITMEN ORGANISASI DAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN**

**DAERAH-BARANG MILIK DAERAH (SIMDA-BMD)**

**TERHADAP EFEKTIVITAS PENGELOLAAN**

**BARANG MILIK DAERAH DI**

**PEMERINTAH KABUPATEN**

**BREBES**

**SKRIPSI**

Oleh:

**Nida Rafa Arofah**

**NPM : 4322600102**

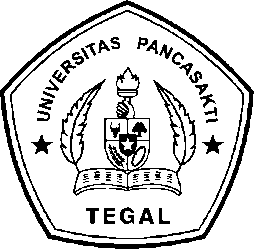
Diajukan Kepada:

**Program Studi Akuntansi**

**Fakultas Ekonomi dan Bisnis**

**Universitas Pancasakti Tegal**

**2024**



**PENGARUH KUALITAS APARATUR DAERAH, REGULASI BARANG MILIK DAERAH, PENGENDALIAN INTERNAL, KOMITMEN ORGANISASI DAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN**

**DAERAH-BARANG MILIK DAERAH (SIMDA-BMD)**

**TERHADAP EFEKTIVITAS PENGELOLAAN**

**BARANG MILIK DAERAH DI**

**PEMERINTAH KABUPATEN**

**BREBES**

# **SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal

Oleh:

**Nida Rafa Arofah**

**NPM : 4322600102**

Diajukan Kepada:

**Program Studi Akuntansi**

**Fakultas Ekonomi dan Bisnis**

**Universitas Pancasakti Tegal**

**2024**

# 

# 

# **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

**MOTTO**

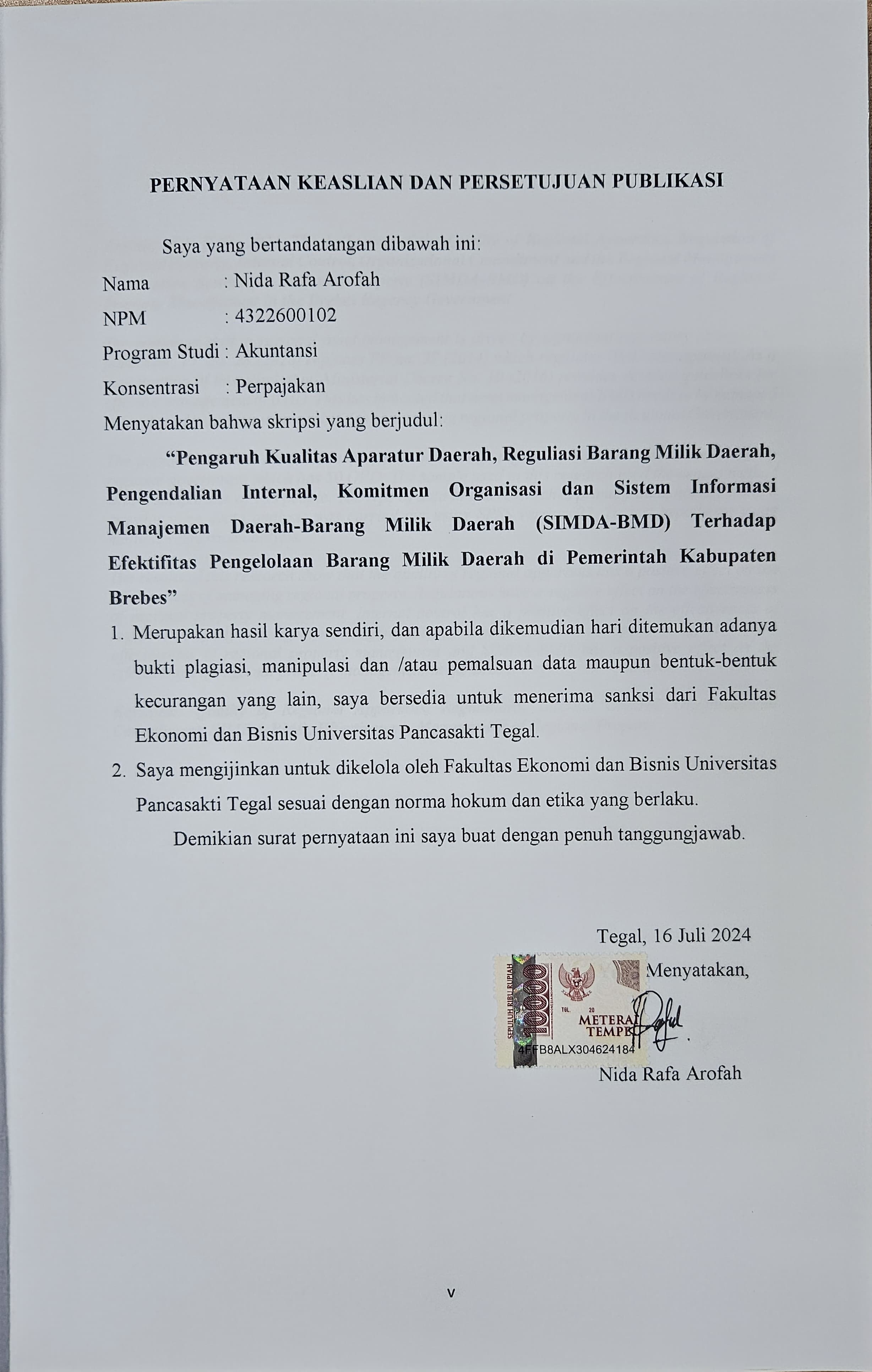
“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”

Q.S Al-Insyirah ayat 5-6

**PERSEMBAHAN**

Syukur Alhamdulillah atas kehadirat-Mu Ya Allah untuk menyelesaikan masa studi di Universitas Pancasakti Tegal. Saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. Orang tua saya, Mamah dan Bapak yang selalu mendo’akan saya, membimbing dan telah memberikan kasih saying yang tak terhingga serta dukungan moral dan materiil untuk keberhasilan saya.
2. Rekan-rekan kerja Sub Bagian Keuangan di tempat saya bekerja yang telah memberikan semangat, motivasi dan doa’anya.
3. Teman-teman Konversi. Mba Rizqi, Mba Ragil, Mba Merlin, Mba Angel, Mba Nadia dan teman konversi lainnya yang tidak bisa saya sebut satu per satu, terima kasih do’a, semangat dan motivasinya.
4. Ciwi-ciwiku yang dulu berjuang bareng, Ana, Dini, Isqi, dan Tryas. Terima kasih selalu ada untuk memotivasi saya.
5. Sahabat KKN Desa Gunung Karang terutama Ganiz. Terima kasih do’a dan semangatnya.
6. Semua teman-teman akuntansi.
7. Kepada semua teman, saudara yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, saya persembahkan skripsi ini untuk kalian.



# ***ABSTRACT***

***Arofah, Nida Rafa, 2024, The Influence of the Quality of Regional Apparatus, Regulation of Regional Property, Internal Control, Organizational Commitment and the Regional Management Information System for Regional Property (SIMDA-BMD) on the Effectiveness of Regional Property Management in the Brebes Regency Government***

*The paradigm shift in regional asset management is driven by significant regulatory changes. In particular, PP no. 28 (2020) replaces PP no. 27 (2014) which regulates BMD management. As a continuation of this regulation, Ministerial Decree No. 19 (2016) provides detailed guidelines for effective management of BMD. This has indicated that asset management/BMD needs to be managed better in order to prevent irregularities in managing regional property in the Regional Government.*

*The population in this study are employees who manage regional property in the Brebes Regency regional government which has 50 OPD. The sample used in this research used the census method with a sample size of 108 people. The type of data in this research is primary data, namely using a questionnaire. Data analysis was carried out using SPSS version 22. To test hypotheses using multiple regression analysis.*

*The results of this research show that the quality of regional apparatus has a positive effect on the effectiveness of managing regional property. Regulations have a negative effect on the effectiveness of regional property management. Internal control has a positive effect on the effectiveness of regional property management. Organizational Commitment has no positive effect on the effectiveness of regional property management and SIMDA-BMD has a positive effect on the effectiveness of regional property management in the Brebes Regency Government.*

***Keywords: Quality of Regional Apparatus, Regulations, Internal Control, Organizational Commitment, SIMDA-BMD, Effectiveness, Management of Regional Property***

# **ABSTRAK**

**Arofah, Nida Rafa, 2024, Pengaruh Kualitas Aparatur Daerah, Reguliasi Barang Milik Daerah, Pengendalian Internal, Komitmen Organisasi dan Sistem Informasi Manajemen Daerah-Barang Milik Daerah (SIMDA-BMD) Terhadap Efektifitas Pengelolaan Barang Milik Daerah di Pemerintah Kabupaten Brebes**

Pergeseran paradigma dalam pengelolaan aset daerah didorong oleh perubahan regulasi yang signifikan. Secara khusus, PP No. 28 (2020) menggantikan PP No. 27 (2014) yang mengatur pengelolaan BMD. Sebagai kelanjutan dari peraturan tersebut, Permendari No. 19 (2016) memberikan pedoman rinci untuk pengelolaan BMD yang efektif. Ini telah mengindikasikan bahwa dalam pengelolaan aset/BMD perlu dikelola dengan lebih baik agar mencegah adanya penyimpangan dalam mengelola barang milik daerah yang ada di Pemerintah Daerah.

Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai yang mengelola barang milik daerah pada pemerintah daerah kabupaten brebes yang memiliki 50 OPD. Penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini mengunakan metode sensus dengan jumlah sampel sebanyak 108 orang. Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yaitu dengan menggunakan kuesioner. Analisis data dilakukan dengan menggunakan SPSS versi 22. Untuk pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi berganda.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kualitas aparatur daerah berpengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan barang milik daerah. Regulasi berpengaruh negatif terhadap efektivitas pengelolaan barang milik daerah. Pengendalian internal berpengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan barang milik daerah. Komitmen Organisasi tidak berpengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan barang milik daerah dan SIMDA-BMD berpengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan barang milik daerah di Pemerintah Kabupaten Brebes.

**Kata Kunci: Kualitas Aparatur Daerah, Regulasi, Pengendalian Internal, Komitmen Organisasi, SIMDA-BMD, Efektivitas, Pengelolaan Barang Milik Daerah**

# **KATA PENGANTAR**

Puji Syukur kepada Allah SWT, berkat Rahmat, Hidayah dan Karunia – Nya kepada kita semua, sehingga kami dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Pengaruh Kualitas Aparatur Daerah, Regulasi Barang Milik Daerah, Pengendalian Internal, Komitmen Organisasi dan Sistem Informasi Manajemen Daerah-Barang Milik Daerah (SIMDA-BMD) Terhadap Efektivitas Pengelolaan Barang Milik Daerah di Pemerintah Kabupaten Brebes”.**

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana akuntansi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal.

Peneliti menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Maka dari itu pada kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dr. Dien Noviany Rahmatika, S.E, M.M, Ak, C.A, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pncasakti Tegal.
2. Dr. Abdullah Mubarok, S.E, M.M, Ak, C.A, selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis serta selaku Dosen Pembimbing I yang sudah membimbing, memberikan saran dan motivasi kepada peneliti.
3. Eva Anggra Yunita, SE., M.Acc., Ak, selaku Dosen Pembimbing II yang selalu memotivasi peneliti.

Peneliti menyadari skripsi ini tidak lepas dari kekurangan, maka Peneliti mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kata, peneliti berharap skripsi ini berguna bagi para pembaca dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Tegal, 16 Juli 2024



Nida Rafa Arofah

# **DAFTAR ISI**

[HALAMAN JUDUL i](#_Toc170334752)

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING [ii](#_Toc170334753)

[HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI SKRIPSI iii](#_Toc170334754)

[MOTTO DAN PERSEMBAHAN iv](#_Toc170334755)

HALAMAN [PERNYATAAN KEASLIAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI v](#_Toc170334756)

[*ABSTRACT* vi](#_Toc170334757)

[ABSTRAK vii](#_Toc170334758)

[KATA PENGANTAR viii](#_Toc170334759)

[DAFTAR ISI ix](#_Toc170334760)

[DAFTAR TABEL xi](#_Toc170334761)

[DAFTAR GAMBAR xii](#_Toc170334762)

[DAFTAR LAMPIRAN xiii](#_Toc170334763)

[BAB I PENDAHULUAN 1](#_Toc170334764)

[A. Latar Belakang Masalah 1](#_Toc170334765)

[B. Rumusan Masalah 9](#_Toc170334766)

[C. Tujuan Penelitian 10](#_Toc170334767)

[D. Manfaat Penelitian 11](#_Toc170334768)

[BAB II TINJAUAN PUSTAKA 12](#_Toc170334769)

[A. Landasan Teori 12](#_Toc170334770)

[1. *Stewardship Theory* (Teori Pertanggungjawaban) 12](#_Toc170334771)

[2. Teori Keagenan *(Agency Theory)* 13](#_Toc170334772)

[3. Kualitas Aparatur Daerah 14](#_Toc170334773)

[4. Regulasi Barang Milik Daerah (BMD) 17](#_Toc170334774)

[5. Pengendalian Internal 18](#_Toc170334775)

[6. Komitmen Organisasi 20](#_Toc170334776)

[7. SIMDA-BMD 22](#_Toc170334777)

[8. Efektivitas Pengelolaan Barang Milik Daerah 24](#_Toc170334778)

[B. Penelitian Terdahulu 26](#_Toc170334779)

[C. Kerangka Pemikiran Konseptual 38](#_Toc170334780)

[D. Hipotesis 44](#_Toc170334781)

[BAB III METODE PENELITIAN 45](#_Toc170334782)

[A. Jenis Penelitian 45](#_Toc170334783)

[B. Populasi dan Sampel 45](#_Toc170334784)

[C. Definisi Konseptual dan Operasionalisasi Variabel 48](#_Toc170334785)

[1. Definisi Konseptual 48](#_Toc170334786)

[2. Operasionalisasi Variabel 50](#_Toc170334787)

[D. Metode Pengumpulan Data 52](#_Toc170334788)

[E. Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian 54](#_Toc170334789)

[1. Uji Validitas 54](#_Toc170334790)

[2. Uji Reliabilitas 54](#_Toc170334791)

[F. Metode Analisis Data 55](#_Toc170334792)

[BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 63](#_Toc170334793)

[A. Gambaran Umum 63](#_Toc170334794)

[1. Letak Geografis Kabupaten Brebes 63](#_Toc170334795)

[2. Wilayah Administrasi 64](#_Toc170334796)

[3. Visi dan Misi Kabupaten Brebes 64](#_Toc170334797)

[4. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Brebes 65](#_Toc170334798)

[B. Hasil Penelitian 67](#_Toc170334799)

[1. Karakteristik Responden 67](#_Toc170334800)

[2. Hasil Uji Validitas dan Realibilitas 70](#_Toc170334801)

[3. Hasil Metode Analisis Data 72](#_Toc170334802)

[C. Pembahasan 84](#_Toc170334803)

[BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 93](#_Toc170334804)

[A. Kesimpulan 93](#_Toc170334805)

[B. Saran 94](#_Toc170334806)

[DAFTAR PUSTAKA 96](#_Toc170334807)

# **DAFTAR TABEL**

[Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu](#_Toc158620071) 33

[Tabel 3.1 Daftar Sampel](#_Toc158620071) 46

[Tabel 3.2 Operasional Variabel](#_Toc158620071) 50

[Tabel 3.3 Instrumen Skala Likert](#_Toc158620071) 53

[Tabel 4.1 SKPD Kabupaten Brebes](#_Toc158620071) 65

[Tabel 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin](#_Toc158620071) 67

[Tabel 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia](#_Toc158620071) 68

[Tabel 4.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja](#_Toc158620071) 68

[Tabel 4.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir](#_Toc158620071) 69

[Tabel 4.6 Karakteristik Responden Berdasarkan Kursus/Bimtek/Diklat](#_Toc158620071) 69

[Tabel 4.7 Hasil Uji Validitas](#_Toc158620071) 70

[Tabel 4.8 Hasil Uji Realibilitas](#_Toc158620071) 72

[Tabel 4.9 Hasil Uji Normalitas](#_Toc158620071) 73

[Tabel 4.10 Hasil Uji Multikolinieritas](#_Toc158620071) 74

[Tabel 4.11 Hasil Uji Heteroskedastisitas](#_Toc158620071) 75

[Tabel 4.12 Persamaan Regresi Liner Berganda](#_Toc158620071) 76

[Tabel 4.13 Hasil Uji F](#_Toc158620071) 79

[Tabel 4.14 Hasil Uji T](#_Toc158620071) 80

[Tabel 4.15 Uji Koefisien Determinasi (R2)](#_Toc158620071) 83

# **DAFTAR GAMBAR**

[Gambar 2.1 Kerangka Konseptual](#_Toc158620071) 43

[Gambar 4.1 Peta Adminitratif Kabupaten Brebes](#_Toc158620071) 64

# **DAFTAR LAMPIRAN**

[Kuesioner](#_Toc158620071) 101

[Data Angket](#_Toc158620071) 108

Hasil output SPSS ver 22 (Uji Validitas dan Uji Reliabilitas Data Variabel X1, X2, X3, X4, X5 dan Y112

Hasil Output SPSS versi 22 (Uji Normalitas)119

[Hasil Ouput SPSS versi 22 (Uji Multikoliearitas)](#_Toc158620071) 119

Hasil Output SPSS versi 22 (Uji heterokedastisitas)120

Hasil Output SPSS versi 22 (Uji Regresi Liner Berganda)120

Hasil Output SPSS versi 22 (Uji f)120

Hasil Output SPSS versi 22 (Uji t)121

Hasil Output SPSS versi 22 (Uji R2)121

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **Latar Belakang Masalah**

Dalam Akuntansi Sektor Publik terdapat sebuah perubahan besar yaitu adanya reformasi tata kelola pemerintahan serta organisasi lainya. Kejadian ini tidak hanya di negara-negara lain, tetapi juga dialami Indonesia. Tekanan untuk reformasi menimbulkan demokrasi pengelolaan organisasi yang mencangkup transparansi juga akuntabilitas. Khususnya tekanan untuk reformasi lebih berkaitan terhadap bidang pengelolaan keuangan publik. Di Indonesia tuntutan masyarakat untuk menghadirkan transparansi dan akuntabilitas terutama karena adanya desentralisasi pengelolaan pemerintahan di daerah membuat pemerintah pusat Bersama daerah agar membuat sistem kelola keuangan yang memiliki transparansi serta akuntabilitas tinggi (Hutagalung, 2016). Desentralisasi memiliki dua keuntungan yaitu meningkatkan partisipasi, prakarsan juga kreativitas masyarakat dalam Pembangunan. Tak hanya itu, juga meningkatkan alokasi sumber daya produktif karena wewenang kebijakannya dibawa dalam jenjang pemerintahan yang terendah (Yunita, 2021).

UU No. 32 beserta 33 (2004). Masing-masing berisi kebijakan berlaku secara efektif mengenai Pemerintah Daerah dan Perimbangan Keuangan. Ini menciptakan berubahnya perspektif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang semula tersentralisasi menjadi desentralisasi. Desentralisasi ialah wewenang eksplorasi, kelola, serta mengembangkan daerahdiserahkan kepada pemda guna peningkatan kesejahteraan masyarakat (Septriyani, 2022)

Otonomi daerah membuat pemerintah daerah berkewenangan serta memiliki kuasa dalam mengelola sumber daya daerahnya tanpa campur tangan pemerintah pusat. Didalam hak otonom ini mencakup Pengelolaan Barang MilikDaerah (BMD). Dalam mewujudkan akuntabilitas laporan keuangan daerah, pengelolaan BMD menjadi bagian komponen strategis paling vital dalam mengelola keuangan daerah. Kerangka pengelolaan kekayaan pada pemerintahan daerah yang berperan penting telah diakui dan disadari di seluruh dunia meskipun dalam menerapkannya cukup rumit sebab masih timbul beragam permasalahan dalam pengelolaannya (Rahmadhani & Ariani, 2022). Dengan total nilai aset yang tidak sedikt serta cakupannya yang luas, ini memberikan kesulitan tersendiri pada pengelolaannya (Listiani & Agustin, 2022). Berdasarkan PP RI No. 27 (2014) mengenai Pengelolaan, dijelaskan bahwa Barang Milik Daerah atau BMD ialah seluruh objek/benda dimana perolehannya menggunakan APBD ataupun dari sumber legal lain.

Untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang efektif. Pengelolaan BMD perlu dilaksanakan secara profesional dan transparan. Hal ini mencakup diterapkannya prinsip-prinsip *good governance*, memastikan bahwa pengelolaannya dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, manajerial, dan yuridis. Sementara itu, desentralisasi telah memberikan tantangan bagi pemerintah daerah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan demokratis dan melayani masyarakat lebih baik. Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, sangat penting bagi para pemangku kepentingan utama lainnya serta masyarakat umum untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses tersebut. Partisipasi tersebut meliputi keterlibatan dalam perencanaan, penganggaran, penerapan, administrasi, pelaporan, pertanggungjawaban, serta pengawasan. (Tabita, 2021).

Dalam berbagai wilayah daerah di Indonesia masih menghadapi permasalahan klasik mengenai pengelolaan BMD. Badan Pengawas Keuangan (BPK) secara konsisten menyoroti permasalahan penyajian aset tetap dalam pendapat tahunan atas keuangan pemda. Masalah yang terus berulang ini bersumber dari pengelolaan dan pemeliharaan BMD yang tidak tertib serta keluar dari ketentuan pengelolaan BMD (Syahputra et al., 2019).

Pergeseran paradigma dalam pengelolaan aset daerah didorong oleh perubahan regulasi yang signifikan. Secara khusus, PP No. 28 (2020) menggantikan PP No. 27 (2014) yang mengatur pengelolaan BMD. Sebagai kelanjutan dari peraturan tersebut, Permendari No. 19 (2016) memberikan pedoman rinci untuk pengelolaan BMD yang efektif. Ini telah mengindikasikan bahwa dalam pengelolaan aset/BMD perlu dikelola dengan lebih baik agar mencegah adanya penyimpangan dalam mengelola BMD di Pemda. Dengan demikian, Pengelolaan Aset BMD merupakan suatu aktivitas rumit dalam penanganannya yang harus dikerjakan pemda sehingga memerlukan penanganan secara khusus (Tabita, 2021).

Menurut Simamora & Halim (2012) Pemerintah daerah sering menghadapi masalah karena mereka tidak mematuhi pedoman pengelolaan aset daerah, sehingga menimbulkan beberapa masalah. Pertama, proses perencanaan pengadaan aset daerah tidak sesuai dengan peruntukannya. Hal ini mengakibatkan aset-aset tersebut digunakan tidak sesuai dengan fungsinya. Selain itu, pemerintah daerah tidak memperhitungkan biaya tambahan yang timbul selama proses akuisisi yang kemudian ditambahkan ke dalam nilai aset tetap secara keseluruhan. Aset milik daerah yang pemeliharaannya tidak baik jatuh ke tangan yang salah, bahkan ada aset tetap atau BMD yang tidak dapat ditelusuri keberadaanya hingga menjadi aset hilang yang tidak terdeteksi. Selain itu, terdapat beberapa penyimpangan dalam pengelolaan aset daerah. Secara khusus, beberapa pejabat daerah yang telah pensiun tidak mengembalikan aset milik Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Selain itu, aset-aset yang diwarisi dari kabupaten induk dialihkan ke daerah pemekaran tanpa bukti kepemilikan serta tidak didukung dengan rincian data yang informatif (Syahputra et al., 2019).

Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes juga tidak luput dari permasalahan aset barang milik daerah. Permasalahan yang terjadi setiap tahun ini dihadapi oleh Pengelola Barang Daerah masih sama yaitu seputar aset tetap. Pada Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemkab Brebes TA 2017 sebagaimana dilaksanakan BPK-RI ditemukan adanya saldo Aset Tetap di Neraca yang berbeda dengan KIB dengan selisih sebesar Rp. 315,42 Milyar, terjadinya selisih tersebut dikarenakan adanya perbedaan antara aset tetap antara KIB dengan Neraca untuk beberapa OPD tertentu dan kesalahan pencatatan aset pada KIB. Dilain hal, Berdasarkan surat Bupati Brebes Nomor : 700/088/R/2020 tanggal 9 Juni 2020 tentang Tindak Lanjut LHP BPK-RI Perwakilan Propinsi Jawa Tengah atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020, atas temuan SPI Nomor 5 : Penatausahaan dan Pengamanan Aset Belum Memadai dengan isi agar segera melakukan inventarisasi dan menelusuri aset tetap, yakni tanah, gedung serta bangunan yang belum/salah dicatat, dicatat tidak wajar dan dicatat tidak lengkap dan akurat untuk selanjutnya memperbaiki pencatatannya dalam KIB (Kartu Inventarisasi Barang). Menurut Pengurus Barang Sekretariat Daerah Kabupaten Brebes mengatakan jika Aset Setda jumlahnya sangat banyak perlu waktu untuk melacak keberadaan aset yang hilang atau yang belum tercatat pada KIB. Permasalahan yang terjadi pada pengelolaan BMD berdasarkan penjelasan pengurus tersebut di Setda Brebes diantaranya Pengurus Barang Pembantu tidak melaporkan adanya aset baru pada tiap Bagian sehingga tidak tercatat pada KIB, sulitnya melacak aset yang hilang/rusak, kurangnya sosialisasi terkait pengelolaan BMD terutama untuk SIMDA-BMD dan kurangnya koordinasi antara pengurus barang setda dan pengurus barang bagian (Prasetyo, 2023)

Temuan tersebut mengindikasikan bahwa masih belum dikelolanya secara efektif dan efisiennya barang milik daerah di Kabupaten Brebes. Iniditunjukan secara nyata, yakni pengelolaan barang milik daerah masih kurang optimal, selaras tercatat dalam opini Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) dalam melaksanakan koordinasi penyelenggaraan inventarisasi serta pencatatan dan pelaporan barang milik daerah (BMD). Ketidaksesuaian pada pengelolaannya disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satu masalah utama adalah inventarisasi barang milik daerah tidak secara akurat mencerminkan temuan-temuan tinjauan lapangan yang dilakukan oleh pemeriksa. Selain itu, terdapat aset yang rusak masih tercatat sebagai aset tetap. Tak hanya itu, nilai barang serta letak barang juga tidak diinformasikan secara jelas (Prasetyo, 2023).

Pengelolaan BMD yang tidak tepat menimbulkan konsekuensi yang signifikan. Secara khusus, hal ini dapat menyebabkan informasi laporan keuangan yang tidak dapat diandalkan, termasuk laporan aset daerah, yang sangat penting untuk transparansi publik (Peny, 2022). Kualitas pengelolaan aset daerah tercermin dari kualitas datanya serta efektivitas pengelolaannya. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan BMD di Kabupaten Brebes belum berjalan dengan baik. Ini sebagaimana yang ditunjukkan oleh temuan BPK-RI dalam laporan hasil pemeriksaannya (BPK-RI, 2017).

Kualitas aparatur daerah dianggap sebagai faktor penting dalam pengelolaan BMD yang efektif. Menurut Permendagri No. 19 (2016), pengguna BMD diharapkan untuk mengelola serta menatausahakannya dengan baik. Hal ini menyoroti peran penting yang dimainkan oleh perangkat daerah dalam memastikan pengelolaan aset daerah berjalan efektif. Pentingnya kepatuhan terhadap peraturan UU dalam menjalankan berbagai tugasnya menjadi pedoman pemerintah daerah (Septriyani, 2022).

Menurut Septriyani (2022), Dalam pengelolaan BMD diperlukan sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi serta berkualitas. Berdasarkan penjelasan tersebut, pejabat daerah diharapkan mempunyai pemahaman serta keahlian yang mendalam mengenai sistem pengelolaan BMD. Pada pengelolaan aset, perangkat daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan harus memiliki kemampuan fisik serta intelektual dalam pelaksanaan pengelolaan barang sehingga pengelolaan barang ini bisa dilakukan dengan optimal. Hasil penelitian Ricardo et al. (2022) menjelaskan, perangkat daerah yang berkualitas dapat meningkatkan pengelolaan BMD. Temuan tersebut selaras hasil Rahmadhani & Ariani (2022), menunjukan bahwa kualitas aparatur mempunyai pengaruh positif terhadap kualitas pengelolaan BMD.

OPD dalam aktivitasnya menggunakan dana APBD. Mereka wajib melakukan pengelolaan keuangan daerah secara efektif serta efisien. Ini perwujudan tanggungjawab publik, termasuk dalam pengelolaan BMD. Perihal pelaksanaan tugasnya, OPD harus mematuhi peraturan yang berlaku, yang memberikan pedoman yang diperlukan untuk mengelola BMD. Peraturan, kebijakan, dan prosedur ini berfungsi sebagai prinsip kerja dan petunjuk rinci untuk pengelolaan aset/barang milik daerah (Rahmadhani & Ariani, 2022). Hasil penelitian Yuliana & Taufik (2021) membuktikan bahwa regulasi memengaruhi efektivitas pengelolaan/manajemen aset. Hasil tersebut selaras temuan Rahmadhani & Ariani (2022) yang menunjukan bahwa peraturan tersebut memiliki dampak positif dan tidak signifikan terhadap pengelolaan BMD. Artinya, peraturan berperan dalam membentuk pengelolaan aset daerah.

Selain regulasi, faktor lain yang diduga mempengaruhi pengelolaan BMD yang efektif adalah sistem pengendalian internal. Setiap OPD diwajibkan untuk menerapkan sistem pengendalian internal untuk memastikan pengelolaan BMD yang baik. Pada kegiatan penatausahaan BMD, penting adanya sistem pengendalian internal yang mencakup aspek-aspek penting seperti pencatatan, inventarisasi, serta pelaporan BMD. Faktor-faktor tersebut secara kolektif berdampak pada pencapaian tujuan daerah. Ini pada akhirnya juga berkontribusi pada kualitas nilai BMD yang tercermin dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) (Rahmadhani & Ariani, 2022). Hasil penelitian Rahmadhani & Ariani (2022) membuktikan bahwa pengendalian internal memengaruhi secara positif pengelolaan BMD. Sejalan dengan penelitian tersebut Astini (2018) menunjukan sistem pengendalian internal memengaruhi secara positif juga nyata keefektifan pengaturan aset. Di sisi lain, temuan Listiani & Agustin (2022) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal tidak berdampak positif pada variabel terikatnya.

Komitmen organisasi merupakan faktor penting lainnya yang mendukung pengelolaan BMD yang efektif. Komitmen ini mengacu pada sejauh mana karyawan mengidentifikasi dan mendukung tujuan dan nilai-nilai organisasi mereka, serta berkomitmen untuk mempertahankan keanggotaan mereka di dalamnya (Syaifullah, 2014). Komitmen ini dapat diamati melalui sikap, perilaku, serta persepsinya (Halim, 2012). Adanya keteguhan yang dimiliki organisasi akan menumbuhkan kepercayaan diri, dukungan karyawan, dan kesetiaan terhadap tujuan dan nilai perusahaan. Dalam konteks pengelolaan BMD, keberadaan lembaga yang dapat melakukan pengelolaan aset secara optimal serta selaras regulasi sangatlah penting. Peran organisasi amat penting dalam menentukan kualitas pengelolaan BMD. Sebab, sistem yang terbaik sekalipun tidak akan optimal tanpa dukungan kelembagaan yang baik. Fakta tersebut selaras temuan penelitian Yusnidar et al. (2021) yakni komitmen organisasi memiliki dampak pada pengelolaan aset. Namun demikian, Peny (2022) menyatakan bahwa komitmen organisasi memiliki dampak kecil pada kualitas pengelolaan BMN.

Faktor terakhir yang diduga memengaruhi efektivitas pengelolaan BMD ialah SIMDA-BMD. Sistem ini diharapkan dapat mendukung terwujudnya akuntabilitas Pemda SKPKD maupun SKPD (Supriyanto, 2015). Hasil Penelitian Eka Yuliana & Taufik (2021) menunjukan bahwa Sistem Informasi Manajemen memengaruhi efektivitas aset tetap. Selaras itu, temuan Rahmadhani & Ariani (2022) menunjukan bahwa SIMDA-BMD memengaruhi secara positif Pengelola BMD.

Dari pemaparan latar belakang yang telah dijabarkan, peneliti hendak melakukan penelitian. Dalam hal ini, ditetapkan judul “Pengaruh Kualitas Aparatur Daerah, Regulasi Barang Milik Daerah, Pengendalian Internal, Komitmen Organisasi Dan Sistem Informasi Manajemen Daerah-Barang Milik Daerah (SIMDA-BMD) Terhadap Efektivitas Pengelolaan Barang Milik Daerah Di Pemerintah Kabupaten Brebes”.

## **Rumusan Masalah**

Dari latar belakang tersebut, permasalahan dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah Kualitas Aparatur Daerah berpengaruh terhadap Efektivitas Pengelolaan Barang Milik Daerah di Pemerintah Kabupaten Brebes?
2. Apakah Regulasi Barang Milik Daerah berpengaruh terhadap Efektivitas Pengelolaan Barang Milik Daerah di Pemerintah Kabupaten Brebes?
3. Apakah Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Efektivitas Pengelolaan Barang Milik Daerah di Pemerintah Kabupaten Brebes?
4. Apakah Komitmen Organisasi berpengaruh terhadap Efektivitas Pengelolaan Barang Milik Daerah di Pemerintah Kabupaten Brebes?
5. Apakah Sistem Informasi Manajemen Daerah-Barang Milik Daerah (SIMDA-BMD) berpengaruh terhadap Efektivitas Pengelolaan Barang Milik Daerah di Pemerintah Kabupaten Brebes?

## **Tujuan Penelitian**

Ini berfungsi sebagai arah yang jelas untuk penelitian, menguraikan bidang-bidang spesifik yang akan dieksplorasi. Dengan demikian, penelitian bertujuan:

1. Untuk mengetahui pengaruh Kualitas Aparatur Daerah terhadap Efektivitas Pengelolaan Barang Milik Daerah di Pemerintah Kabupaten Brebes.
2. Untuk mengetahui pengaruh Regulasi Barang Milik Daerah terhadap Efektivitas Pengelolaan Barang Milik Daerah di Pemerintah Kabupaten Brebes.
3. Untuk mengetahui pengaruh Pengendalian Internal terhadap Efektivitas Pengelolaan Barang Milik Daerah di Pemerintah Kabupaten Brebes.
4. Untuk mengetahui pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Efektivitas Pengelolaan Barang Milik Daerah di Pemerintah Kabupaten Brebes.
5. Untuk mengetahui pengaruh Sistem Informasi Manajemen Daerah-Barang Milik Daerah (SIMDA-BMD) terhadap Efektivitas Pengelolaan Barang Milik Daerah di Pemerintah Kabupaten Brebes.

## **Manfaat Penelitian**

Dari tujuannya, penelitian ini bermanfaat dalam hal seperti di bawah ini:

1. Manfaat Teoritis
2. Bagi Penulis

Penelitian di sini menjadi syarat guna memperoleh gelar sarjana.

1. Bagi Perguruan Tinggi

Penelitian ini bermanfaat mengkompilasi dan mensintesis pengetahuan yang ada, yang pada akhirnya dapat menjadi referensi yang berharga bagi penelitian-penelitian selanjutnya dan para praktisi di bidang akuntansi sektor publik khususnya aset daerah.

1. Manfaat Praktis
   * 1. Bagi Pemerintah Daerah

Hasilnya supaya bisa menjadi informasi berharga bagi Pemda dalam mengambil keputusan berkaitan peningkatan efektivitas pengelolaan aset/Barang Milik Daerah (BMD).

# **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

## **Landasan Teori**

### ***Stewardship Theory* (Teori Pertanggungjawaban)**

Menurut Donaldson & Davis (1991) teori *Stewardship* menyatakan bahwa manajemen didorong oleh tujuan kolektif daripada kepentingan individual. Perspektif ini menekankan hubungan antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. Dalam kerangka kerja ini, manajer bertindak untuk kepentingan publik, memprioritaskan kesejahteraan organisasi daripada keuntungan pribadi. Ketika kepentingan pengelola (manajer) dan pemilik berbeda, pengelola cenderung berkolaborasi dibandingkan untuk berkompetisi, karena bekerja sama sejalan dengan kepentingan publik dan tujuan pemilik, yang pada akhirnya berfungsi mencapai tujuan organisasi (Raharjo, 2007).

Menurut konsep ini, manajemen organisasi akan bertindak sebagai “*stewards*/penatalayanan” dengan penuh kesadaran untuk kepentingan kolektif (Tabita, 2021). Teori *stewardship* menyatakan bahwa pemda berperan sebagai pengelola yang dipercaya, yang bertanggung jawab menjalankan tugas dan fungsinya sesuai kehendak dan mandat publik. Pendekatan ini memastikan bahwa Pemda secara efektif mengelola sumber daya daerah guna mencapai tujuan ekonomi, menyediakan layanan publik, menjaga *good governance*, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sebagai pengelola, pemda bertanggung jawab atas pengelolaan BMD (Tabita, 2021).

Penelitian tersebut terkait efektivitas pengelolaan barang milik daerah (BMD), Pemda berperan *stewards/*pengelola. Amanat ini perlu dilakukan dengan memberikan informasi yang baik, jelas dan bermanfaat untuk kelompok serta pihak-pihak yang menggunakan informasi pemerintah baik secara langsung ataupun tidak langsung. Masyarakat bertindak sebagai prinsipal. Akibatnya aparatur pemerintah dituntut memiliki kualitas terbaik serta mampu melaksanakan inventarisasi, sistem informasi, pengendalian internal tentang BMD yang baik sehingga dapat mengelola barang milik daerah (Tabita, 2021).

### **Teori Keagenan *(Agency Theory)***

Dalam teori ini, keterkaitan yang terjadi pada manajer dalam hal ini pemerintah daerah serta rakyatnya sebagai pemilik sumber daya disebut hubungan keagenan. Dalam hubungan ini, masyarakat bertindak sebagai prinsipal dan kepala daerah bertindak sebagai agen; akibatnya, prinsipal memiliki tanggung jawab yang signifikan untuk memantau kinerja agen melalui informasi akuntansi (Zenita et al., 2021).

Keterlibatan seluruh orang dalam hubungan keagenan membuat mereka berupaya memaksimalkan utilitas. Namun, upaya memaksimalkan utilitas ini sering kali menimbulkan konflik kepentingan. Pemilik bertujuan untuk meningkatkan profitabilitas. Sementara itu, manajemen berupaya memenuhi kecukupan finansial dengan memaksimalkan kontrak kompensasi (Mardiyah, 2002).

Wujud penggunaan teori keagenan dalam penelitian ini ialah masyarakat bertindak sebagai prinsipal dan pemerintah daerah dalam hal ini Aparatur Daerah khususnya yang berhubungan dengan BMD bertindak sebagai agen. Masyarakat memberi kewenangan kepada OPD, yang berfungsi sebagai mekanisme akuntabilitas. OPD bertanggung jawab untuk menyampaikan laporan rutin kepada prinsipal, memberikan transparansi atas tindakan mereka. Karena prinsipal tidak memiliki pengetahuan langsung mengenai aktivitas agen, maka terdapat risiko masalah keagenan atau asimetri informasi. Untuk memitigasi hal ini, prinsipal dapat menggunakan laporan pertanggungjawaban dalam memantau kinerja OPD dalam mengelola barang milik daerah.

### **Kualitas Aparatur Daerah**

Setiap kegiatan pastilah memiliki tujuan yang hendak dicapai. Tidak hanya meraih tujuannya, mereka juga selalu berfokus pada hasil yang berkualitas tinggi. Sementara istilah “kualitas” definisinya beragam, definisi konvensionalnya biasanya mengacu pada atribut spesifik suatu barang atau jasa, seperti keandalan, kemudahan penggunaan, gaya, dan sebagainya (Soloha, 2015).

Kualitas mencakup berbagai fitur produk, termasuk keistimewaan langsung dan atraktif. Fitur langsung mengacu pada kepuasan langsung yang dirasakan konsumen dari mengonsumsi produknya yang berkarakteristik kualitas tinggi. Di sisi lain, fitur atraktif melibatkan kepuasan tidak langsung yang dirasakan pelanggan karena persepsi positif terhadap karakteristik produk yang unggul (Soloha, 2015).

Perangkat Daerah, yang disebut pula sebagai Sumber Daya Manusia dalam konteks pemerintahan. Ini mencakup PNS yang ditugaskan di daerah tertentu. Berdasarkan UU No. 5 Tahun (2014). Ini merupakan perubahan dari UU No. 43 (1999) mengenai Pokok-Pokok Kepegawaian. Pegawai Negeri didefinisikan sebagai pegawai yang memenuhi syarat UU. Pegawai tersebut dinaikkan jabatannya oleh pejabat yang berwenang.

Menurut Astini (2018) mengartikan kualitas aparatur mengacu pada tingkat kompetensi dan efektivitas aparatur daerah dalam pelaksanaan tanggung jawabnya. Sehingga Pengurus barang setidaknya harus memiliki keterampilan dasar dalam pembukuan, perencanaan, pengadaan, ketelitian, kejujuran dan semangat kerja yang tinggi. Aparatur daerah memainkan peran penting dalam pergerakan suatu organisasi, aparatur yang berkualitas dapat mempengaruhi keberhasilan kinerja organisasi dan pencapaian visi dan misi organisasi. Kualitas Aparatur dalam mengelola BMD juga berpengaruh dalam membantu pengelolaan barang milik daerah setiap instansi (Ratmono & Rochmawati, 2018).

Sumber daya manusia pada sebuah lembaga tidak hanya kumpulan karyawan secara individu, melainkan sebuah unit kohesif yang bekerja sama guna tercapainya tujuan kelompok. Setiap karyawan memainkan peran penting dalam proses ini, dan kontribusi mereka dapat diukur berdasarkan latar belakang pendidikan dan kualifikasi mereka (Bria, 2019). Pemerintah Indonesia menyadari pentingnya pengembangan karyawan melalui pendidikan dan pelatihan, seperti yang dituangkan dalam UU No. 5 (2014) tentang ASN. UU ini menekankan hak serta kesempatan bagi seluruh ASN terkait meningkatkan kompetensinya yang dinyatakan dalam pasal 70 (Bria, 2019).

Aparatur yang memiliki pendidikan baik, keterampilan teknologi informasi serta pengetahuan tentu akan membuat pengelolaan BMD menjadi efektif dan efisien. Pemerintah sudah mefasilitasi sistem informasi canggih, jika aparatur kurang berkualitas maka menjadi tidak berguna. Begitu pula dalam penerapan pengelolaan BMD yang lain, aparatur yang memiliki kualitas mampu menjalankan tugas dan wewenang sesuai aturan sebagai aparatur (Astini, 2018). Kualitas Aparatur dapat diukur melalui latar belakang Pendidikan, Pelatihan, dan Pengalamannya (Ratmono & Rochmawati, 2018).

Pendidikan dan pelatihan merupakan proses komprehensif yang melibatkan berbagai cara serta metode dengan bertujuan meningkatkan kapabilitas dan kemampuan karyawan sehingga dapat meningkatkan produktivitas kerja. Tingkat Pendidikan dan keterampilan manajemen pekerja akan meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha (Mubarok, 2011). Pelatihan yang dapat dilakukan oleh pengurus barang antara lain dengan diadakannya diklat atau bimbingan teknis (Bimtek) yang bisa diadakan setiap bulan sekali atau sesuai kemampuan oleh tiap instansi seperti adanya Diklat Penghapusan dan Pemindahtanganan BMD, Bimtek Penatausahaan BMD, Bimtek Pemeriksaan Aset Tetap, Bimtek dan Pelatihan Pemanfaatan dan Pengelolaan BMD. Pelatihan tersebut tentu saja akan memberikan pengetahuan dan pengalaman serta pemahaman untuk pengurus barang. Aparatur pengurus barang apabila kurang berkualitas tidak mampu menyelesaikan tugasnya dengan baik. Ini membuat hasil yang dicapai menjadi tertunda dan membuang-buang waktu dan energi. Sebaliknya, kualitas aparatur daerah sangat penting untuk pengelolaan yang efektif di tingkat BMD karena yang berkualitas telah dibekali pengetahuan serta pemahaman terkait segala urusan yang dikerjakan (Azhar, 2017).

### **Regulasi Barang Milik Daerah (BMD)**

Peraturan merupakan aturan guna mengatur hubungan antara individu di dalam suatu negara atau masyarakat (Rahmadhani & Ariani, 2022). Sementara itu, berdasarkan KBBI, Regulasi adalah Pengaturan.

UU di dalam negeri adalah sumber hukum formil yang terdiri dari UU dan keputusan tertulis yang dibuat oleh lembaga negara yang sifatnya wajib ditaati atau akan dikenai hukuman jika dilanggar. Untuk kepentingan umum maka dibuat peraturan perundang-undangan untuk mengatur pemerintah dan penyelenggaraanya. Peraturan ini juga membatasi pemerintah dan penyelenggaranya, atau pemerintah tidak diperbolehkan memiliki kuasa mutlak tanpa batas (Azhar, 2017).

Dalam konteks otonomi daerah, konsep legislasi menjadi sangat penting. Menurut Pasal 1 (2) UU No. 12 Tahun 2011. Mendefinisikan aturan perundangan sebagai peraturan tertulis yang berisikan peraturan umum dan mengikat. Aturan tersebut dibuat oleh lembaga ataupun pejabat berwenang. Terhadap konteks otonomi daerah, pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mengelola aset-asetnya sendiri. Lebih lanjut, Brebes, salah satu daerah otonom, diberikan wewenang memiliki aturan perundangan sendiri yang tentunya tetap merujuk pada aturan UU negara

Perda Kabupaten Brebes No. 6 (2019) tentang Pengelolaan BMD menguraikan pengelolaan aset daerah secara komprehensif. Peraturan ini mencakup berbagai aspek, termasuk pengadaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, dan lain-lain. Selain itu, peraturan ini juga mengatur pedoman pengawasan dan pengendalian, serta ganti rugi dan sanksi mengenai BMD. Lebih lanjut, peraturan tersebut mengatur penggunaan cara kelola keuangan Badan Layanan Umum Daerah. Peraturan ini juga menjelaskan pemindahtanganan BMD, yang mencakup peran desa dalam memfasilitasi proses tukar menukar serta hibah BMD.

Dalam Pasal 3 dijelaskan BMD mencakup:

* + - 1. Barang Milik Daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD; atau
      2. Barang Milik Daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Peraturan yang dikeluarkan pemerintah pusat maupun daerah sangat penting untuk menjaga administrasi serta ketertiban dalam mengelola BMD.

### **Pengendalian Internal**

Pengendalian Internal adalah bagian dari manajemen risiko dan wajib dijalankan tiap instansi dalam meraih sebuah ketercapaian. Oleh karena itu, hal ini harus ada di setiap Lembaga secara teratur guna menjaga stabilitas dan kepercayaan masyarakat. Pengendalian Internal dilakukan oleh manajemen, bertujuan menjaga asset, juga meraih target serta operasi. Selain itu, juga memastikan integritas serta etika yang tinggi, kepatuhan terhadap peraturan serta keputusan yang berlaku, dengan diikuti kepercayaan yang memadai pada informasi keuangan serta operasional (Moeller, 2009). Sedangkan menurut Mulyadi (2002), menjelaskan pengendalian internal ialah aktivitas manajemen, dilaksanakan pihak organisasi yang berperan dalam manajerial serta personal lainnya. Ini dibuat guna menjamin aktivitas yang efektif serta efisien, keandalan laporan keuangan, serta peraturan yang berlaku.

Sistem pengendalian internal bertujuan:

1. Manajemen kepemilikan kekayaan
2. Mengecek tingkat teliti serta kendala yang terjadi dalam perhitungan keuangan
3. Menciptakan efisiensi
4. Memengaruhi kebijakan manajemen

Sejumlah unsur utama pengendalian internal menurut Mulyadi (2016) adalah:

1. Dipisahkannya tanggungjawab tugas secara tegas
2. Ketentuan serta aturan pencatatan dapat melindungi asset, utang, pendapatan hingga beban
3. Praktek aman tanpa kecurangan dalam menjalankan tugas serta fungsi kelembagaan
4. Kesesuaian antara *value* karyawan dengan tanggungjawabnya.

Ada lima komponen menurut Jusup (2014) dalam pengendalian internal:

1. *Control Environment*

Untuk memastikan kejujuran adalah nilai organisasi dan bahwa tindakan *illegal* dikecam. Manajemen bertanggung jawab membangun lingkungan yang mendukung pengendalian.

1. *Risk Assesment*

Untuk memastikan kesuksesan dan stabilitas jangka panjang perusahaan, penting untuk mengidentifikasi dan menilai berbagai potensi risiko yang dapat berdampak pada operasinya.

1. *Control Active*

Manajemen perlu membuat kebijakan serta prosedur yang jelas guna mengatasi ancaman untuk mengurangi penyelewengan.

1. *Information system and communication*

Semua informasi penting harus dikomunikasikan oleh sistem pengendalian internal ke semua lapisan organisasi.

1. *Monitoring*

Monitoring yang memadai diperlukan untuk sistem pengendalian internal. Manajemen puncak atau dewan komisaris harus melaporkan pelanggaran yang signifikan.

### **Komitmen Organisasi**

Menurut Greenberg dan Baron (2003:160) (dalam Sangian et al., 2019), Komitmen Organisasi merupakan tingkat dimana pegawai terlibat dalam organisasi yang tertarik dengan tujuan serta nilai instansi dan ingin tetap menjadi anggotanya. Ini ditunjukan dengan penerimaan dan komitmen individu terhadap nilai dan tujuan serta keinginan untuk melakukan yang terbaik bagi perusahaan tempat kerjanya. Luthans (2006:249) (dalam Bria, 2019) menyatakan komitmen organisasi adalah konsep multifaset yang mencakup tiga elemen kunci. Pertama, melibatkan keinginan kuat untuk bekerja selaras tujuan organisasi. Kedua, komitmen ditandai dengan keinginan kuat mengabdi pada organisasi. Terakhir, komitmen organisasi melibatkan penerimaan yang tulus dan kepatuhan terhadap nilai serta tujuan organisasi. Pada intinya, komitmen organisasi adalah mencerminkan dedikasi pegawai terhadap organisasi juga upaya berkelanjutan mereka untuk berkontribusi pada kesuksesan dan pertumbuhannya.

Komitmen Organisasi menurut Allen dan Meyer (1990) (dalam Halim, 2012) menyebutkan 3 komponen organisasi*.* Di antaranya adalah afektif, kontinuitas/berkelanjutan, serta normative. Komponen komitmen berbeda antara satu dengan lainnya dan perbedaan utama ada dalam berpola pikir dianggap untuk mengkarakteristikan komitmen. Tiga komponen tersebut memiliki benang merah yang sama. Komitmen merupakan tindakan psikologis yang mendefinisikan hubungan tiap-tiap orang dengan organisasinya. Ini memengaruhi keputusan mereka untuk terus menjadi bagian dari organisasi tersebut.

Penjelasan tiap-tiap komponennya adalah:

1. Komitmen afektif, diwujudkan dengan rasa kasih sayang pada organisasi. Dalam komitmen afektif, hubungan antara individu dan organisasi didasari oleh tiga hal yaitu emosional, identifikasi, serta keterlibatan karyawan.
2. Komitmen berkelanjutan, yakni terkait kesadaran individu untuk tidak meninggalkan organisasi. Jika individu meninggalkan organisasi, maka individu dasar telah mengalami kerugian tertentu. Komitmen berkelanjutan bisa mengalami perkembangan sebab dirasa menimbulkan kerugian apabila memutuskan keluar dari organisasi. Aksi tersebut ada duanyaitu investasi dan alternatif.
3. Komitmen normative, yakni rasa kesetiaan yang mendalam. Ini berasal dari tanggung jawab moral individu serta perasaan kewajiban pribadi terhadap organisasi mereka. Komitmen ini muncul dari pengalaman sosialisasi yang dialami seseorang dalam organisasi.

Kusuma (2014) menyebutkan komitmen organisasi mempunyai ciri:

1. Ada hasrat untuk mempertahankan keberlangsungan organisasi
2. Yakin serta menerima dengan tulus upaya pencapaian keberhasilan organisasi.
3. Adanya keinginan berusaha demi organisasinya.

### **SIMDA-BMD**

PP No. 95/2018 menguraikan berbagai prinsip dasar untuk penerapan SPBE. Peraturan ini memberikan kerangka kerja untuk sistem administrasi pemerintah dan sistem layanan publik, yang menekankan aspek-aspek utama seperti efektivitas, integrasi, kesinambungan, efisiensi, akuntabilitas, interoperabilitas, juga aman. Peraturan juga menekankan pentingnya berbagi infrastruktur, data, dan informasi (Rahmadhani & Ariani, 2022).

Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) adalah sistem canggih. Ini dirancang guna mendukung Pemda menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan aturan UU. SIMDA memfasilitasi seluruh prosesnya, mulai dari penyusunan, penatausahaan, hingga pertanggungjawaban. (Utami & Sari, 2017).

Upaya pengembangan system informasi ini telah menghasilkan. Di antaranya program aplikasi SIMDA Keuangan, Gaji, Pendapatan, dan BMD. Di antara aplikasi-aplikasi tersebut, SIMDA-BMD merupakan alat yang sangat penting untuk mengelola aset daerah, yang mencakup berbagai kegiatan seperti perencanaan, pengadaan, penatausahaan, penghapusan, serta pengakuntansian (Utami & Sari, 2017).

Berdasarkan Permendagri Nomor 17/2007 ayat 30. Program yang diciptakan tersebut dipergunakan agar mempermudah pendaftaran serta pelaporan BMD secara optimal. Menurut BPKP (2015), tiap-tiap bagian system dalam aplikasi mengeluarkan hasil:

“Sub sistem perencanaan menghasilkan Daftar Kebutuhan Barang dan Pemeliharaan, Daftar Rencana Pengadaan Barang Daerah dan Daftar Rencana Pemeliharaan Barang Daerah. Sub sistem pengadaan menghasilkan Daftar Hasil Pengadaan, Daftar Hasil Pemeliharan Barang, dan Daftar Kontrak Pengadaan. Sub sistem penatausahaan menghasilkan Kartu Inventaris Barang (KIB), Kartu (sejarah) Barang, Kartu Inventaris ruangan (KIR), Buku Inventaris (BI), Daftar Mutasi Barang Daerah, dan Rekap Hasil Sensus, serta Label Barang. Sub sistem penghapusan menghasilkan SK Penghapusan, Lampiran SK Penghapusan dan Daftar Barang yang Dihapuskan. Sub sistem akuntansi menghasilkan Daftar Barang yang masuk Neraca *(Intracomptable)*, Daftar Barang Extracomptable, Lampiran Neraca, Daftar Penyusutan Aset Tetap, dan Daftar Aset Lainnya (Barang Rusak Berat), dan Rekapitulasi Barang per OPD."

### **Efektivitas Pengelolaan Barang Milik Daerah**

Efektivitas berarti berhasil atau tepat guna. Menurut KBBI, efektivitas merupakan membawa keberhasilan dan daya guna. Efektivitas merupakan konsep terukur yang mengukur seberapa baik suatu upaya atau strategi mencapai tujuan atau sasaran yang diinginkan. Ini berarti bahwa efektivitas adalah tentang dampak kumulatif dari semua tindakan yang diambil untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Menurut Zanoeddin dkk, (2006) (dalam Sri, 2009), faktor pemengaruh efektivitas adalah sebagai berikut:

1. Produktifitas
2. Lingkungan Kerja
3. Waktu
4. Pengawasan
5. Tugas
6. Evaluasi Kerja
7. Motivasi
8. Perlengkapan serta Fasilitas

Sujarweni (2015) menjelaskan BMD sebagai asset Pemda berwujud. Ini dlihat dari sudut pandang akuntansi pemerintahan. Aset ini menjadi sesuatu yang bernilai ekonomi yang dimiliki serta dijalankan pemerintahan. Ini adalah hasil dari kejadian masa lalu serta manfaat ekonomi serta sosial harapannya didapatkan. Berbagai asset tersebut bisa diukur menggunakan satuan uang, tetapi juga termasuk sumber daya bukan keuangan yang sangatlah penting guna memelihara dan memanfaatkan sumber daya dengan cara yang tidak hanya melayani kebutuhan masyarakat umum, tetapi juga melindungi aset sejarah dan budaya untuk generasi mendatang.

Prinsip dasar keberhasilan pengelolaan BMD terdiri dari tiga 3 syarat pokok :

1. Merencanakan secara tepat
2. Melaksanakan/memanfaatkan seoptimal mungkin
3. Mengawasi *(Monitoring)*

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 28/2020, pengelolaan BMD harus mengikuti prinsip-prinsip tertentu untuk memastikan pemanfaatan yang efektif dan efisien. Asas-asas tersebut antara lain asas fungsional, yang menyatakan bahwa keputusan serta penyelesaian masalah dalam pengelolaan aset harus dilakukan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya. Selain itu, kepastian hukum juga sangat penting, karena pengelolaan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan untuk menjamin kepatutan dan keadilan. Efisiensi juga merupakan prinsip utama, karena penggunaan barang milik negara harus diarahkan untuk memenuhi standar kebutuhan. Ini ditaati guna mendorong pelaksanaan tugas pemerintah secara optimal. Transparansi merupakan prinsip penting lainnya, karena proses pengelolaan wajib bersifat tebuka serta dapat diakses publik untuk mengamankan aset negara. Terakhir, akuntabilitas dan kepastian nilai juga sangat penting, karena keakuratan jumlah dan nilai aset negara sangat penting untuk pengelolaan yang tepat.

Tujuan dari Pengelolaan BMD, yaitu:

1. Mewujudkan akuntabilitas dalam pengelolaan BMD
2. Mewujudkan tata kelola BMD secara tertib, efektif, juga efisien
3. Menegakkan terselenggaranya pemerintahan serta pembangunan daerah yang lancar.

Dari penjelasan di atas, disimpulkan secara keseluruhan bahwa efektivitas pengelolaan BMD melibatkan proses yang komprehensif yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.

## **Penelitian Terdahulu**

Riset lampau memainkan peran penting dalam penelitian saat ini. Berfungsi sebagai sumber daya yang berharga untuk referensi dan panduan. Dengan memanfaatkan temuan dan wawasan dari penelitian sebelumnya, para peneliti dapat membangun pengetahuan yang sudah ada dan menghindari upaya duplikasi. Di sini, beberapa penelitian terdahulu dengan pembahasan sesuai akan dibahas, memberikan landasan bagi penelitian saat ini dan membantu menetapkan relevansi dan signifikansinya:

1. Penelitian Fitrah Rahmadhani dan Ria Ariani (2022). Judul penelitiannya ialah “Kualitas Aparatur, Simda – BMD, Regulasi Dan Pengendalian Internal Terhadap Pengelolaan BMD” menggunakan variabel independen yaitu Kualitas Aparatur, SIMDA-BMD, aturan serta Kendali Internal. Sementara variabel dependennya ialah Pengelolaan BMD. Di sini digunakan teknik pengambilan sampel Slovin. Digunakan untuk memilih sedikitnya 80 responden. Pada akhirnya, didapatkan 95 kuesioner yang telah diisi. Temuan-temuan yang diperoleh mengungkapkan beberapa hal penting. Pertama, kualitas aparatur yang digunakan dalam pengelolaan BMD ternyata berdampak positif terhadap kualitas pengelolaan secara keseluruhan. Kedua, keberadaan dan penegakan peraturan juga ditemukan memiliki dampak positif untuk kualitas pengelolaan. Selain itu, SIMDA-BMD ditemukan memiliki pengaruh yang arahnya positif untuk kualitas pengelolaan. Yang paling penting, pengendalian internal ditemukan memengaruhi secara signifikan serta positif terhadap kualitas pengelolaan, yang mengindikasikan peran pentingnya dalam memastikan pengelolaan BMD yang efektif.
2. Penelitian Listiani dan Henri Agustin (2022) dengan judul “Pengaruh Inventarisasi, Kompetensi Aparatur, dan Pengendalian Internal terhadap Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah.” Di sini menggunakan variabel bebas inventarisasi, Kompetensi Aparatur, serta Kendali Internal. Selain itu, variable dependennya yaitu Optimalisasi Pengelolaan BMD. Penelitian ini memakai metode total *sampling*. Digunakan memilih responden dari 27 OPD. Sebanyak 4 orang dari masing-masing OPD dipilih sebagai responden. Temuan riset menunjukkan variabel inventarisasi memberikan pengaruh positif secara parsial serta nyata untuk variabel terikat. Namun, variabel kompetensi aparatur serta variabel sistem pengendalian internal ditemukan tidak memengaruhi secara nyata variabel terikat. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun manajemen persediaan memainkan peran penting dalam mengoptimalkan pengelolaan BMD, namun kecakapan serta kualitas aparatur serta sistem kendali internal tidak memiliki pengaruh langsung untuk hasil ini.
3. Penelitian Theresia Lounggina Luisa Peny (2022) yang berjudul “Peran Sistem Informasi, Kompetensi Pegawai, Komitmen Organisasi: Investigasi Kualitas Pengelolaan Barang Milik Negara” menggunakan variable bebas Sistem Informasi, Kompetensi Pegawai serta Komitmen Organisasi. Kemudian, variabel dependennya, yakni Kualitas Pengelolaan Barang Milik Negara. Di sini menggunakan 63 responden. Untuk melakukan pengujian hipotesis, digunakan regresi linier berganda. Temuan menghasilkan informasi, sistem informasi berpengaruh signifikan serta positif untuk kualitas kelola BMN. Sebaliknya, pengaruh yang kecil atau tidak berpengaruh ditemukan pada kompetensi pegawai dan komitmen organisasi pada kelola BMN.
4. Riset Yusnidar, Muammar Khadafi dan Damanhur (2020). Judulnya ialah “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Manajemen Aset Pada Pemerintahan Kota Lhokseumawe.” Digunakan variable bebas Kualitas Aparatur daerah, Aturan, Akuntabilitas, Sistem Informasi Akuntansi serta Komitmen Organisasi sementara variable dependennya ialah Manajemen Aset. Riset berfokus pada populasi 34 SKPD Kota Lhokseumawe. Ini dibagi menjadi tujuh kelompok. Jumlah respondennya adalah 102 orang. Temuan dari riset ialah beberapa faktor memiliki dampak yang signifikan dan positif terhadap manajemen aset. Secara khusus, semua variabel bebasnya memengaruhi secara positif serta signifikan terhadap manajemen aset. Namun, satu variabel yang tidak memengaruhi secara positif ialah pengaruh akuntabilitas terhadap manajemen aset.
5. Penelitian Ria Eka Yuliana, Taufeni Taufik dan Nasrizal (2021) dengan judul “Pengaruh Kualitas Aparatur, Regulasi, Sistem Informasi Manajemen, Sistem Pengendalian Intern Terhadap Efektivitas Manajemen Aset Tetap Di Pemerintah Kabupaten Bengkalis Dengan Komitmen Pimpinan Sebagai Variabel Moderasi”. Menggunakan Variabel Independen yaitu Kualitas Aparatur, Regulasi, Sistem Informasi Manajemen, Sistem Pengendalian Intern. Variabel dependen di sini digunakan Efektivitas Manajemen Aset Tetap serta Variabel Moderasi yaitu Komitmen Pimpinan. Penelitian ini mensurvei 138 individu dari tiga OPD yang berbeda. Temuan menunjukkan bahwa kualitas aparatur, peraturan, sistem informasi manajemen, serta sistem pengendalian internal secara signifikan memengaruhi efektivitas manajemen aset tetap. Selain itu, di sini menemukan bahwa komitmen pimpinan memainkan peran moderasi yang penting dalam hubungan antara faktor-faktor ini dan efektivitas manajemen aset tetap.
6. Penelitian Jefry Eka Prayogi, Iqlima Azhar dan Muhammad Rizqi Zati (2021) yang berjudul “Pengaruh Pemahaman Regulasi, Sistem Informasi, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Manajemen Aset Pada Skpk Kota Langsa.” Digunakan variable bebas Pemahaman Regulasi, Kompetensi SDM. Variabel terikat, yakni Manajemen Aset. Penelitian ini menggunakan metode sensus untuk menentukan ukuran sampelnya. Sampelnya terdiri dari total 60 orang. Temuan penelitian ini menunjukkan beberapa hubungan yang signifikan antar variabel. Pertama, studi ini menemukan bahwa memahami peraturan, sistem informasi, serta kompetensi karyawan memiliki dampak simultan untuk pengelolaan aset. Kedua, memahami peraturan ditemukan memiliki pengaruh langsung dan signifikan untuk manajemen aset. Sebaliknya, sistem informasi ditemukan tidak memiliki dampak yang signifikan untuk manajemen aset. Terakhir, kompetensi SDM ditemukan memengaruhi secara langsung dan signifikan untuk manajemen aset.
7. Penelitian Yuli Astini (2018) dengan judul “Kualitas Aparatur, Sistem Informasi, Sistem Pengendalian Intern Dan Efektivitas Manajemen Aset Tetap.” Di sini menggunakan variable Independen Kualitas Aparatur, Sistem Informasi, Sistem Kendali Internal. Kemudian, variable dependen yaitu Efektivitas Manajemen Aset. Jumlah sampel penelitiannya 64 responden. Metode pemilihannya menggunakan *purposive sampling*. Temuan penelitian ini memberikan wawasan yang signifikan mengenai hubungan antara variabelnya. Secara khusus, penelitian ini mengungkapkan bahwa sistem informasi memiliki dampak negatif serta nyata untuk keefektifan manajemen aset tetap, yang menunjukkan bahwa kehadirannya justru dapat menghambat proses manajemen. Di sisi lain, sistem kendali internal ditemukan memiliki pengaruh positif serta nyata untuk keefektifan pengelolaan aset tetap. Lebih lanjut, penelitian ini menemukan bahwa kualitas aparat memoderasi pengaruh sistem informasi serta kendali internal terhadap variable terikatnya.
8. Penelitian Handia Fahrurrozi, Akram dan Prayitno Basuki (2019). Penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Kualitas Aparatur Melalui SIMDA dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan BMD” dengan variabel independen yaitu Kualitas Aparatur melalui SIMDA, Sistem Pengendalian Internal. Variabel terikatnya dalam hal ini ialah Pencegahan *Fraud* Pengelolaan BMD. Peneliti menggunakan metode pengambilan sampel tertentu yang dikenal sebagai *purposive sampling*, memilih total 80 partisipan. Temuan menginformasikan, kualitas aparatur serta SIMDA tidak memberikan dampak yang signifikan pada pencegahan kecurangan dalam manajemen BMD. Namun, ditemukan peran penting sistem pengendalian internal dalam mencegah *fraud.*
9. Penelitian Ricardo, Fitriani Astika, dan Doni Jepisah (2022). Penelitiannya yang berjudul “Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) Pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru”. Di sini digunakan variable independen yaitu Kualitas Aparatur Daerah, Kepatuhan pada Regulasi. Selain itu, juga meneliti Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Variable terikatnya ialah Pengelolaan Barang Milik Daerah. Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 138 responden. Temuannya menunjukan Kualitas aparatur daerah, sikap patuh pada aturan serta sistem pengendalian intern pemerintah memengaruhi secara nyata pengelolaan BMD. Akan tetapi, pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh signifikan.
10. Penelitian Dwi Ratmono dan Ana Rochmawati (2018) dengan judul “Determinan Optimalisasi Pengunaan Aset Tetap Pemerintah Daerah” dengan Variabel Independen Perencanaan, Inventarisasi, Evaluasi, Pengawasan, Kualitas SDM, SIPKD-aset serta Variabel Dependen yaitu Optimalisasi aset tetap. Di sini digunakan analisa *SEM-PLS* terhadap 46 OPD Pemkab Semarang. Hasil pengujian menunjukkan informasi inventarisasi berpengaruh positif terhadap optimalisasi aset tetap. Di sini disoroti fakta bahwa perencanaan kebutuhan serta manajemen inventaris menjadi elemen kunci tercapainya pemanfaatan aset tetap yang optimal. Untuk mencapai optimalisasi ini, penting untuk memulai dengan strategi yang terencana dengan baik yang selaras tujuan organisasi.

Adapun penjelasan dari hasil penelitian terdahulu tersebut dirangkum dalam tabel sebagaimana disajikan di bawah:

**Tabel 2.1**

**Penelitian Terdahulu**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama Peneliti & Tahun** | **Judul Penelitian** | **Variabel Penelitian** | **Hasil Penelitian** |
| 1 | Fitrah Rahmadhani dan Ria Ariani (2022) | Kualitas Aparatur, Simda – BMD, Regulasi Dan  Pengendalian Internal Terhadap Pengelolaan BMD | **Variabel Independen:**   1. Kualitas Aparatur Daerah 2. SIMDA-BMD 3. Regulasi 4. Pengendalian Internal   **Variabel Dependen:**  Pengelolaan BMD | Temuan-temuan yang diperoleh mengungkapkan beberapa hal penting. Pertama, kualitas aparatur yang digunakan dalam mengelola BMD ternyata berdampak positif terhadap kualitas pengelolaan secara keseluruhan. Kedua, keberadaan dan penegakan peraturan juga ditemukan memiliki dampak positif terhadap kualitas pengelolaan. Selain itu, variable bebas SIMDA-BMD ditemukan memiliki pengaruh positif pada kualitas pengelolaan. Yang paling penting, pengendalian internal ditemukan memengaruhi secara signifikan serta positif kualitas pengelolaan, yang mengindikasikan peran pentingnya dalam memastikan pengelolaan BMD yang efektif. |
| 2 | Listiani dan Henri Agustin (2022) | Pengaruh Inventarisasi, Kompetensi Aparatur, dan Pengendalian Internal  terhadap Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah | **Variabel Independen:**   1. Inventarisasi 2. Kompetensi Aparatur 3. Pengendalian Internal   **Variabel Dependen:**  Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah | Temuan riset menunjukkan variabel inventarisasi memberikan pengaruh positif secara parsial serta nyata untuk variable terikat. Namun, variabel kompetensi aparatur serta variabel sistem pengendalian internal ditemukan tidak memengaruhi secara nyata variable terikat.. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun manajemen persediaan memainkan peran penting dalam mengoptimalkan pengelolaan BMD, namun kompetensi aparatur maupun sistem kendali internal tak memiliki pengaruh langsung pada hasil ini. |
| 3 | Theresia Lounggina Luisa Peny (2022) | Peran Sistem Informasi, Kompetensi Pegawai, komitmen Organisasi: Investigasi Kualitas Pengelolaan Barang Milik Negara | **Variabel Independen:**   1. Sistem Informasi 2. Kompetensi Pegawai 3. Komitmen Organisasi   **Variabel Dependen:**  Kualitas Pengelolaan Barang BMN | Hasil penelitian Temuan ialah sistem informasi memengaruhi secara signifikan serta positif untuk kualitas kelola BMN. Sebaliknya, pengaruh yang kecil atau tidak berpengaruh ditemukan pada kompetensi pegawai dan komitmen organisasi pada kelola BMN. |
| 4 | Yusnidar, Muammar Khadafi dan Damanhur (2020) | Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Manajemen Aset Pada Pemerintahan Kota Lhokseumawe | **Variabel Independen:**   1. Kualitas Aparatur daerah 2. Regulasi 3. Akuntabilitas 4. Sistem Informasi Akuntansi 5. Komitmen Organisasi   **Variabel Dependen:**  Manajemen Aset | Temuan dari riset ialah beberapa faktor memiliki dampak yang signifikan dan positif terhadap manajemen aset. Secara khusus, seluruh variabel bebasnya ditemukan memengaruhi secara positif serta signifikan manajemen aset. Namun, tidak ditemukan pengaruh akuntabilitas terhadap manajemen aset. |
| 5 | Ria Eka Yuliana, Taufeni Taufik dan Nasrizal (2021) | Pengaruh Kualitas Aparatur, Regulasi, Sistem Informasi Manajemen, Sistem  Pengendalian Intern Terhadap Efektivitas Manajemen Aset Tetap Di  Pemerintah Kabupaten Bengkalis Dengan Komitmen Pimpinan Sebagai  Variabel Moderasi | **Variabel Independen:**   1. Kualitas Aparatur 2. Regulasi 3. Sistem Informasi Manajemen 4. Sistem Pengendalian Intern   **Variabel Dependen:**  Efektivitas Manajemen Aset Tetap  **Variabel Moderasi:**  Komitmen Pimpinan | Temuan menunjukkan bahwa kualitas aparatur, peraturan, SIM, serta sistem pengendalian internal secara signifikan memengaruhi efektivitas manajemen aset tetap. Selain itu, di sini menemukan bahwa komitmen pimpinan memainkan peran moderasi yang penting dalam hubungan antara faktor-faktor ini dan efektivitas manajemen aset tetap. |
| 6 | Jefry Eka Prayogi, Iqlima Azhar dan Muhammad Rizqi Zati (2021) | Pengaruh Pemahaman Regulasi, Sistem Informasi, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap  Manajemen Aset Pada Skpk Kota Langsa | **Variabel Independen:**   1. Pemahaman Regulasi 2. Kompetensi Sumber Daya Manusia   **Variabel Dependen:**  Manajemen Aset | Temuan di sini menunjukkan beberapa hubungan yang signifikan antar variabel. Pertama, studi ini menemukan bahwa memahami peraturan, sistem informasi, serta kompetensi karyawan memiliki dampak simultan untuk pengelolaan aset. Kedua, memahami peraturan ditemukan memiliki pengaruh langsung dan signifikan untuk manajemen aset. Sebaliknya, sistem informasi ditemukan tidak memiliki dampak yang signifikan untuk manajemen aset. Terakhir, kompetensi SDM ditemukan memengaruhi secara langsung serta signifikan untuk manajemen aset. |
| 7 | Yuli Astini (2018) | Kualitas Aparatur, Sistem Informasi, Sistem Pengendalian Intern Dan Efektivitas  Manajemen Aset Tetap | **Variabel Independen:**   1. Kualitas Aparatur 2. Sistem Informasi 3. Sistem Pengendalian Intern   **Variabel Dependen:**  Efektivitas Manajemen Aset | Temuan penelitian ini memberikan wawasan yang signifikan mengenai hubungan antara variabelnya. Secara khusus, penelitian ini mengungkapkan bahwa sistem informasi memiliki dampak negatif serta nyata untuk keefektifan manajemen aset tetap, yang menunjukkan bahwa kehadirannya justru dapat menghambat proses manajemen. Di sisi lain, sistem kendali internal ditemukan memiliki pengaruh positif serta nyata untuk keefektifan pengelolaan aset tetap. Lebih lanjut, penelitian ini menemukan bahwa kualitas aparat memoderasi pengaruh sistem informasi serta kendali internal terhadap variable terikatnya. |
| 8 | Handia Fahrurrozi, Akram dan Prayitno Basuki (2019) | Pengaruh Kualitas Aparatur Melalui SIMDA dan Sistem Pengendalian  Internal Terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan BMD | **Variabel Independen:**   1. Kualitas Aparatur melalui SIMDA 2. Sistem Pengendalian Internal   **Variabel Dependen:**  Pencegahan *Fraud* Pengelolaan BMD | Temuan menginformasikan, kualitas aparatur serta SIMDA tidak memberikan dampak yang signifikan pada pencegahan kecurangan dalam manajemen BMD. Namun, ditemukan peran penting sistem pengendalian internal dalam mencegah *fraud*. |
| 9 | Ricardo, Fitriani Astika, dan Doni Jepisah (2022) | Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) Pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru | **Variabel Independen:**   1. Kualitas Aparatur Daerah 2. Kepatuhan pada Regulasi 3. Pemanfaatan Teknologi Informasi 4. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah   **Variabel Dependen:**  Pengelolaan BMD | Temuan di sini menunjukan variable independen memengaruhi secara signifikan pengelolaan BMD, sementara pemanfaatan teknologi informasi tidak. |
| 10 | Dwi Ratmono dan Ana Rochmawati (2018) | Determinan Optimalisasi Pengunaan Aset Tetap Pemda | **Variabel Bebas:**   1. Perencanaan 2. Inventarisasi 3. Penilaian 4. Pengawasan 5. Kualitas SDM 6. SIPKD-aset   **Variabel Dependen:**  Optimalisasi aset tetap | Temuan pengujian ialah manajemen inventaris memiliki dampak positif serta nyata terhadap optimalisasi aset tetap. Di sini disoroti fakta bahwa perencanaan kebutuhan serta manajemen inventaris menjadi elemen kunci tercapainya pemanfaatan aset tetap yang optimal. Untuk mencapai optimalisasi ini, penting untuk memulai dengan strategi yang terencana dengan baik yang selaras tujuan organisasi. |

**Sumber : Data diolah, 2024**

## **Kerangka Pemikiran Konseptual**

Kerangka konseptual di sini berfungsi sebagai struktur logis yang secara sistematis mengkaji realitas empiris dari variabel penelitian. Kerangka pemikiran dirancang guna memberikan alur logis yang menjelaskan hubungan antar variabel.

Penelitian di sini menggunakan pendekatan *stewardship theory,* dan *agency theory.* Variabel yang diteliti, yakni kualitas aparatur daerah, regulasi BMD, pengendalian internal, komitmen organisasi dan SIMDA-BMD.

1. Pengaruh Kualitas Aparatur Daerah terhadap Efektivitas Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)

Menurut Astini (2018) mengartikan kualitas aparatur dengan taraf kemampuan mereka dalam pelaksanaan tugas, fungsi, serta kewajiban termasuk dalam pengelolaan aset. Dengan demikian, aparatur daerah dituntut untuk mempunyai pemahaman serta ahli untuk mengelola BMD. Sehingga Pengurus barang sebagai aparatur daerah yang bertugas dalam bidang aset/BMD setidaknya harus memiliki keterampilan dasar dalam pembukuan, ketelitian, kejujuran serta semangat kerja yang tinggi. SDM pengurus barang bisa diidentifikasi melalui pelatihan serta pengalaman relevan (Ratmono & Rochmawati, 2018). Aparatur daerah memainkan peran penting dalam pergerakan suatu organisasi, aparatur yang berkualitas dapat mempengaruhi keberhasilan kinerja organisasi dan pencapaian visi dan misi organisasi.

Dengan demikian, aparatur daerah dituntut untuk mempunyai pemahaman serta ahli untuk mengelola BMD. Pada pengelolaan aset, kualitas aparatur daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan harus memiliki berkemampuan fisik juga kecerdasan untuk melaksanakan manajemen aset sehingga BMD bisa dikelola secara efektif. Temuan penelitian Ricardo et al., (2022) menginformasikan aparatur daerah yang berkualitas mampu mengoptimalkan penatakelolaan BMD. Temuan tersebut selaras hasil penelitian Rahmadhani & Ariani (2022), temuannya menunjukan kualitas aparatur memiliki pengaruh positif pada kualitas tata Kelola BMD. Kualitas Aparatur dalam mengelola barang milik daerah juga berpengaruh dalam membantu efektivitas pengelolaan BMD setiap instansi.

1. Pengaruh Regulasi Barang Milik Daerah terhadap Efektivitas Pengelolaan BMD

Aturan berperan vital dalam pengelolaan BMD sebab mengatur bagaimana aset dikelola. Regulasi memegang peranan penting dalam menjamin pengelolaan BMD yang baik. Keberadaan regulasi menjadi jaminan bahwa pengelolaan BMD akan dilakukan secara efektif dan efisien, sehingga mencegah potensi penyimpangan atau kecurangan yang mungkin terjadi dalam berbagai tahapan pengelolaan BMD (Eka Yuliana & Taufik, 2021). Dengan demikian dikeluarkan Perda Kab. Brebes No. 6/2019 mengenai Pengelolaan BMD. Isinya yaitu antara lain Perencanaan Kebutuhan, Pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan hingga Pengendalian BMD. Studi ini menunjukkan bahwa penerapan peraturan yang memadai memiliki dampak langsung terhadap kinerja lembaga pemerintah.

Ketika penerapan aturan benar, informasi yang disebarkan kepada publik menjadi akurat. Hasil penelitian Yuliana & Taufik (2021) membuktikan bahwa regulasi memengaruhi efektivitas pengelolaan/manajemen aset. Hasil tersebut selaras temuan Rahmadhani & Ariani (2022) yang menunjukan bahwa regulasi menunjukkan pengaruh positif namun tidak signifikan pada pengelolaan BMD.

1. Pengaruh Pengendalian Internal terhadap Efektivitas Pengelolaan BMD

Menurut teori *stewardship,* ada korelasi kuat dari kepuasan pelanggan dengan kesuksesan lembaga. Sebagai prinsipal, masyarakat mempercayai pemerintah untuk mengelola sumber daya agar tercapai tujuan organisasi. Pemerintah harus mengawasi pengelolaannya untuk memastikan pelaksanaannya dilakukan dengan mentaati aturan. Untuk mengelola efektif serta efisien juga menciptakan kebijakan pengelolaan aset yang transparan, Pemda harus melakukan kendali intern. Sistem ini diperlukan guna mengawasi operasi pemerintahan daerah dan mencegah kecurangan jika tidak ada pengendalian intern yang efektif di setiap OPD (Bria, 2019).

Untuk meningkatkan keoptimalan, pengendalian internal akan memastikan pelaporan keuangan yang andal. Pengendalian Intern dimaksudkan agar memastikan bahwa aset yang dimiliki organisasi dilindungi dengan benar. Oleh karena itu, pengendalian intern diterapkan untuk memastikan bahwa semua aset perusahaan aman dari pelanggaran kewenangan (Bria, 2019).

Hasil penelitian Rahmadhani & Ariani (2022) membuktikan bahwa pengendalian internal memengaruhi secara positif serta signifikan pengelolaan BMD. Sejalan dengan temuan tersebut Astini (2018) menunjukan sistem pengendalian internal memengaruhi secara positif serta signifikan dalam keefektifan pengelolaan BMD.

1. Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Efektivitas Pengelolaan BMD

Menurut Mathus dan Jackson (dalam Yusnidar et al., 2021) menyatakan komitmen organisasi mengacu pada taraf kepercayaan serta penerimaan yang dimiliki karyawan pada tujuan lembaga. Selain itu, juga keinginan mereka untuk tetap setia kepada organisasi. Komitmen ini tercermin dalam statistik kehadiran serta tingkat pekerja yang keluar dari organisasi (*turnover*). Dalam konteks pengelolaan BMD, komitmen organisasi ditandai dengan adanya loyalitas dan dedikasi pegawai dan aparatur daerah yang berusaha untuk menjalankan tugasnya secara optimal (Sangian et al., 2019).

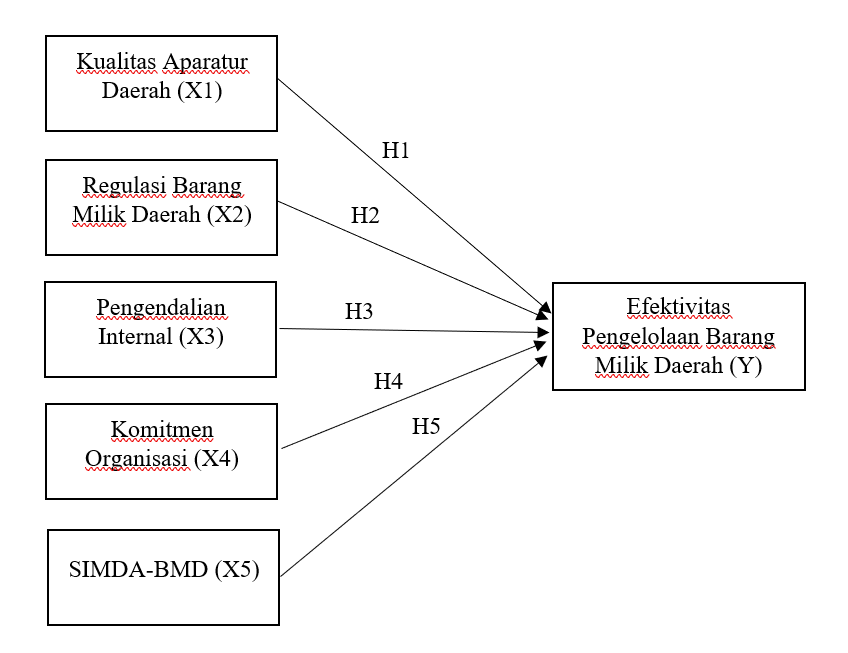
Hasil penelitian Yusnidar et al., (2021) menyimpulkan komitmen organisasi memengaruhi manajemen aset. Sementara Peny (2022) menyatakan komitmen organisasi berdampak kecil dalam kualitas pengelolaan BMN.

1. Pengaruh SIMDA-BMD untuk Efektivitas Pengelolaan BMD

Guna mendapatkan informasi lebih tepat, cepat, akurat juga dipercaya dan dipertanggungjawabkan dibutuhkan perubahan dari manual menuju elektronik dan tersistem, yakni SIMDA-BMD. Upaya pengembangan system informasi ini telah menghasilkan. Di antaranya program aplikasi SIMDA Keuangan, Gaji, Pendapatan, dan BMD. Di antara aplikasi-aplikasi tersebut, SIMDA-BMD merupakan alat yang sangat penting untuk mengelola aset daerah, yang mencakup berbagai kegiatan seperti perencanaan, pengadaan, penatausahaan, penghapusan, serta pengakuntansian (Utami & Sari, 2017). Sistem ini sangat penting dalam menghasilkan informasi handal, akurat, serta tepat waktu agar dapat dimanfaatkan secara efektif oleh pengelola aset. Kian komplit data yang dimasukkan ke dalam database membuat informasi yang diperoleh akan kian rinci serta informatif, yang pada akhirnya akan mendukung pengakuan dan pencatatan aset daerah yang akurat. Kian meningkat kualitas input validasi data pada suatu sistem akan meningkatlan kualitas informasi serta efektivitas pengelolaan BMD/aset (Eka Yuliana & Taufik, 2021).

Hasil Penelitian Eka Yuliana & Taufik (2021) menunjukan Sistem Informasi Manajemen memengaruhi keefektifan aset tetap. Sejalan dengan itu, penelitian Rahmadhani & Ariani (2022) menunjukan bahwa SIMDA-BMD memengaruhi secara positif Pengelolaan BMD.

Dari penjelasan di atas kerangka konseptual dalam penelitian ini digambarkan:

****

**Gambar 2.1**

**Kerangka Konseptual**

## **Hipotesis**

Ini merupakan sesuatu yang disebut jawaban, bersifat sementara terhadap permasalahan yang diteliti (Sangadji, 2010). Dengan demikian, sebelum melakukan penelitian lebih lanjut, hipotesis dirumuskan berdasarkan pengetahuan yang ada dan serta dari penelitian sebelumnya.

Dengan demikian, berdasarkan uraian kerangka pemikiran di atas, di sini dirumuskan hipotesa:

H1: Kualitas Aparatur Daerah berpengaruh positif terhadap Efektivitas Pengelolaan BMD di Pemerintah Kabupaten Brebes

H2: Regulasi BMD berpengaruh positif terhadap Efektivitas Pengelolaan BMD di Pemerintah Kabupaten Brebes

H3: Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap Efektivitas Pengelolaan BMD di Pemkab Brebes

H4: Komitmen Organisasi berpengaruh positif PADA Efektivitas Pengelolaan BMD di Pemkab Brebes

H5: SIMDA-BMD berpengaruh positif untuk Efektivitas Pengelolaan BMD di Pemerintah Kabupaten Brebes

# **BAB III METODE PENELITIAN**

## **Jenis Penelitian**

Pendekatan di sini ialah pendekatan kuantitatif, yakni melibatkan pengumpulan dan analisis data numerik menggunakan teknik statistik. Pendekatan ini berakar pada filosofi positivis, di mana tujuannya adalah meneliti populasi ataupun sampel mempergunakan instrumen terstandardisasi untuk mengumpulkan datanya. Data tersebut kemudian dianalisis menggunakan metode kuantitatif atau statistik untuk menarik kesimpulan. Tujuan dari metode ini adalah untuk menguji hipotesis (Sugiyono, 2016).

Penelitian di sini menjelaskan, menggambarkan, serta menunjukan dampak Kualitas Aparatur Daerah, Regulasi BMD, Pengendalian Internal, Komitmen Organisasi serta SIMDA-BMD untuk Efektivitas Pengelolaan BMD di Pemerintah Kabupaten Brebes.

## **Populasi dan Sampel**

Di sini dijelaskan mengenai populasi, yakni semua yang menjadi sasaran penelitian. Populasi adalah generalisasi dari objek dengan karakteristik serta fitur yang digunakan pneliti dalam meneliti serta membuat kesimpulan (Sugiyono, 2016).

Di sini populasinya ialah pegawai yang turut serta dalam pengelolaan BMD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes. Berdasarkan survei lapangan yang dilakukan oleh peneliti, Pemerintah Kabupaten Brebes memiliki 50 Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dari 50 OPD tersebut ada 108 pegawai yang

berhubungan dengan pengelolaan BMD terdiri atas kasubbag keuangan/kasubbag umpeg serta pengurus barang/pengurus barang pembantu.

Sampel ialah sebagian anggota populasi, dipilih untuk dijadikan sumber data utama. Sampel ini dimaksudkan untuk mewakili seluruh populasi secara akurat. Para peneliti sering menggunakan metode sensus untuk menentukan jumlah sampel yang dibutuhkan, yang melibatkan semua anggota populasi. Teknik ini juga disebut sebagai *sampling* jenuh. Pada penelitian yang dilakukan, metode sampel jenuh digunakan, di mana seluruh populasinya diikutsertakan sebagai sampel (Sugiyono, 2016).

**Tabel 3.1**

**Daftar Sampel**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **OPD Kabupaten Brebes** | **Responden** |
| 1 | Sekretariat Daerah (Setda) | 10 |
| 2 | Sekretariat DPRD (Setwan) | 2 |
| 3 | Inspektorat | 2 |
| 4 | Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga (Dindikpora) | 2 |
| 5 | Dinas Kesehatan (Dinkes) | 2 |
| 6 | Dinas Pekerjaan Umum (DPU) | 2 |
| 7 | Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang (DPSDATARU) | 2 |
| 8 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Dinperwaskim) | 2 |
| 9 | Dinas Sosial (Dinsos) | 2 |
| 10 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinpermades) | 2 |
| 11 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3KB) | 2 |
| 12 | Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah (DLHPS) | 2 |
| 13 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dindukpil) | 2 |
| 14 | Dinas Perhubungan (Dinhub) | 2 |
| 15 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Dinkominfotik) | 2 |
| 16 | Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan (Dinkopumdag) | 2 |
| 17 | Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Dinperinaker) | 2 |
| 18 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) | 2 |
| 19 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Dinbudpar) | 2 |
| 20 | Dinas Arsip dan Perpustakaan (Dinarpus) | 2 |
| 21 | Dinas Perikanan (Dinkan) | 2 |
| 22 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) | 2 |
| 23 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (DPKH) | 2 |
| 24 | Satpol PP | 2 |
| 25 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) | 2 |
| 26 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Baperlitbangda) | 2 |
| 27 | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) | 2 |
| 28 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) | 2 |
| 29 | Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) | 2 |
| 30 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Badan Kesbangpol) | 2 |
| 31 | Rumah Sakit Umum Daerah Brebes | 2 |
| 32 | Rumah Sakit Umum Daerah Bumiayu | 2 |
| 33 | Rumah Sakit Umum Daerah Ir. Soekarno | 2 |
| 34 | Kecamatan Brebes | 2 |
| 35 | Kecamatan Wanasari | 2 |
| 36 | Kecamatan Bulakamba | 2 |
| 37 | Kecamatan Jatibarang | 2 |
| 38 | Kecamatan Songgom | 2 |
| 39 | Kecamatan Tanjung | 2 |
| 40 | Kecamatan Losari | 2 |
| 41 | Kecamatan Larangan | 2 |
| 42 | Kecamatan Ketanggungan | 2 |
| 43 | Kecamatan Kersana | 2 |
| 44 | Kecamatan Banjarharjo | 2 |
| 45 | Kecamatan Tonjong | 2 |
| 46 | Kecamatan Bumiayu | 2 |
| 47 | Kecamatan Sirampog | 2 |
| 48 | Kecamatan Paguyangan | 2 |
| 49 | Kecamatan Bantarkawung | 2 |
| 50 | Kecamatan Salem | 2 |
| **Jumlah** | | **108** |

**Sumber : Pemkab Brebes, 2024**

Berdasarkan tabel diatas maka penelitian ini menggunakan 108 sampel.

## **Definisi Konseptual dan Operasionalisasi Variabel**

### **Definisi Konseptual**

Pengertian ini dapat dijelaskan, yakni unsur penelitian berisi penjelasan terkait karakteristik suatu masalah. Di sini digunakan dua variable, berikut penjelasannya:

1. Variabel dependen

Variabel ini dipengaruhi variabel bebas (Sugiyono, 2016). Yang menjadi variable terikat ialah Efektivitas Pengelolaan BMD. Variabel ini dipengaruhi oleh proses-proses yang dilakukan dalam mengelola BMD yang dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku.

1. Variabel Independen

Ini disebut juga sebagai variable bebas. Keberadaanya memengaruhi variable terikat (Sugiyono, 2016). Baik berpengaruh kea rah positif ataupun negatif.

Variabel Independen di sini ini sebagai berikut:

1. Kualitas Aparatur Daerah

Dalam konteks penelitian ini, kualitas aparatur daerah menjadi tolok ukur dan perlu diupayakan oleh para pejabat setempat yang turut serta mengelola BMD. (Ratmono & Rochmawati, 2018).

1. Regulasi

Kepatuhan pada regulasi adalah sikpa serta aksi yang perlu untuk dilakukan. Di sini, pejabat harus dapat menjalankan sesuai aturan prosedur manajemen BMD (Eka Yuliana & Taufik, 2021).

1. Pengendalian Internal

Pengendalian Internal adalah bentuk pengawasan yang dilakukan manajemen guna menjamin kegiatan operasional selaras tujuan (Bria, 2019).

1. Komitmen Organisasi

Ini adalah taraf dimana pegawai terlibat dalam organisasi, tertarik pada tujuan, nilai, serta sasaran organisasi dan ingin tetap menjadi anggotanya (Sangian et al., 2019).

1. SIMDA-BMD

Ini adalah Sistem Informasi Manajemen, terdiri atas serangkaian prosedur formal yang mengelompokkan data, memproses menjadi sebuah informasi kemudian disebarakan untuk pemakaian atau pengguna informasi (Astini, 2018). Untuk mengetahui data BMD secara tepat dan cepat diperlukan sistem informasi pendukung keputusan atas SIMDA-BMD.

### **Operasionalisasi Variabel**

Operasionalisasi variabel merupakan pembatasan definisi variabel yang diteliti. Di sini mencakup indikator yang akan digunakan dalam pengukuran variable terkait. Operasionalisasi variabel di sini adalah:

**Tabel 3.2**

**Operasional Variabel**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Variabel** | **Dimensi** | **Indikator** | **No. Item**  **Pernyataan/Pertanyaan** | **Skala** | **Sumber** |
| Efektivitas Pengelolaan Barang Milik daerah (Y) | Perencanaan | 1. Perencanaan kebutuhan BMD | 1 | Interval | (Bria, 2019) dan (Listiani & Agustin, 2022) |
|  | Penganggaran | 1. Penganggaran kebutuhan BMD 2. Pengadaan BMD | 2 – 3 | Interval |
| Pemanfaatan | 1. Pemanfaatan BMD | 4 | Interval |
| Pemeliharaan | 1. Pemeliharaan Aset | 5 | Interval |
| Penggunaan | 1. Penggunaan selesai | 6 | Interval |
| Penatausahaan | 1. Inventarisasi 2. BMD yang tercatat | 7 – 8 | Interval |
| Pengawasan | 1. Pengawasan rutin atas pengelolaan BMD | 9 | Interval |
| Penyempurnaan | 1. Penyempurnaan Database | 10 | Interval |
| Kualitas Aparatur Daerah (X2) | Pendidikan | 1. Tingkat Pendidikan sesuai 2. Adanya pendidikan dan pelatihan | 1 – 2 | Interval | (Bria, 2019) dan (Rahmadhani & Ariani, 2022) |
| Pemahaman | 1. Aparatur daerah memiliki pemahaman | 3 | Interval |
|  | Pengalaman | 1. Pengalaman dalam pengelolaan BMD 2. Bekerja sesuai pedoman | 4 – 5 | Interval |  |
| Regulasi (X3) | Regulasi | 1. Kebutuhan Regulasi 2. Kesesuaian Regulasi 3. Kepatuhan Regulasi 4. Pemahaman Regulasi 5. Perubahan Regulasi | 1 – 5 | Interval | (Rahmadhani & Ariani, 2022) |
| Pengendalian Internal (X4) | Integritas serta Nilai Etika | 1. Penegakan Nilai Integritas serta Nilai Etika | 1 | Interval | (Bria, 2019) dan (Rahmadhani & Ariani, 2022) |
| Resiko | 1. Langkah antisipasi 2. Resiko yang timbul | 2 – 3 | Interval |  |
| Informasi | 1. Informasi dan komunikasi yang dibutuhkan | 4 | Interval |
| Pengawasan | 1. Pangawasan terhadap penggunaan BMD | 5 | Interval |
| Komitmen Organisasi | Komitmen | 1. Normatif 2. Afektif 3. Berkelanjutan | 1 - 6 | Interval | (Bria, 2019) |
| SIMDA – BMD | Informasi | 1. Aplikasi relevan sesuai kebutuhan pengelolaan BMD 2. Aplikasi Cepat 3. Aplikasi akurat 4. Aplikasi Lengkap 5. Aplikasi dapat diuji kebenarannya | 1 – 5 | Interval | (Rahmadhani & Ariani, 2022) |

**Sumber: Data diolah, 2024**

## **Metode Pengumpulan Data**

Guna mendapatkan data yang bisa diuji kevalidannya serta selaras permasalahan penelitian, metode untuk mengumpulkan data digunakan beberapa jenis:

1. Kuesioner (Angket)

Ini adalah metode di mana peneliti meminta sampel untuk menjawab seperangkat pernyataan ataupun pertanyaan tertulis (Sugiyono, 2016). Dibuatnya angket ini memiliki tujuan, yakni memperoleh data yang sesuangguhnya. Oleh karena itu, peneliti menyebar kuesioner menggunakan *google form* kepada pegawai di Lingkungan Kabupaten Brebes.

Semua pernyataan yang dibuat dikembangkan berdasarkan indikator yang ditemukan dalam kuesioner. Di sini, indikator yang berupa Skala Likert digunakan untuk memberikan skor pada angket penelitian ini yang merupakan skala yang didasarkan pada sikap, pendapatan, serta persepsi individu mengenai kejadian sosial (Sugiyono, 2016). Rentetan nilai dari tiap instrumen yang digunakan pada skala ini berkisar dari sangat positif hingga sangat negatif.

Di sini penilaian diukur dengan skala likert berikut ini:

**Tabel 3.3**

**Instrumen Skala *Likert***

|  |  |
| --- | --- |
| **Alternatif** | **Skor** |
| Sangat Setuju (SS) | 5 |
| Setuju (S) | 4 |
| Kurang Setuju (KS) | 3 |
| Tidak Setuju (TS) | 2 |
| Sangat Tidak Setuju (STS) | 1 |

**Sumber: Sugiyono, 2016**

Digunakan 5 kategorisasi tersebut dipandang mampu mewakili nilai tingkat intensitas penilaian respondennya.

1. Sumber Data

Ini dibedakan dengan melihat sumber pengambilannnya, meliputi:

1. Data Primer

Didapatkan langsung oleh peneliti ataupun pihak berkepentingan disebut data primer. Perolehannya ialah dari wawancara atau pengisian kuesioner. Dalam hal ini juga disebut sebagai data baru ataupun data asli (Sumarni, 2006).

1. Data Sekunder

Didapatkan melalui sumber terdahulu, yakni hasil penelitian yang sudah terpublikasi, disebut data sekunder. Jenis data yang umumnya didapatkan dari laporan-laporan penelitian lampau atau perpustakaan. Di sini, data sekundernya didapatkan dari jurnal ilmiah dari riset terdahulu, literatur, serta internet (Sumarni, 2006).

## **Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian**

### **Uji Validitas**

Ini menjadi pengujian di mana digunakan dalam rangka mengukur valid tidaknya kuesioner yang dipergunakan. Sebuah instrument memiliki keakuratan jika dapat mengukur apa yang diinginkan atau mampu mengukur serta mengungkapkan variabelnya berkaitan dengan data-datanya. Instrumen dikatakan valid memiliki tingkat validitas yang tinggi. Sementara itu, instrument dikatakan kurang valid maka validitasnya rendah (Riduwan, 2013).

Di sini, validitas instrumen penelitian diuji dengan rumus korelasi. Hasilnya diperbandingkan dengan tabel nilai kritis (rtabel) berdasarkan derajat bebas (df) yang dihitung sebagai konstanta-2. Jika koefisien korelasi di sini atau rhitung melampaui nilai kritis rtabel maka instrumen ini memiliki validitas. Berlaku pula hasil sebaliknya, apabila rtabel melampaui rhitung maka instrumen dianggap tidak valid (Sujarweni, 2015).

### **Uji Reliabilitas**

Pengujian yang digunakan dalam menilai kestabilan jawaban kuesioner. Kuesioner tersebut berfungsi sebagai indikator dari suatu variabel. Reliabilitas Kesioner diakui apabila jawaban yang diberikan oleh individu adalah konsisten dan stabil, yang menunjukkan bahwa instrumen tersebut mengukur variabel secara tepat dan konsisten. Reliabilitas berarti dapat diandalkan dan dapat dipercaya karena instrumen tersebut dianggap dapat dipercaya untuk mengumpulkan data. Realibilitas berarti dapat dipercaya dan dapat diandalkan. Dengan demikian, ketika diulang berkali-kali pun hasilnya konsisten (Riduwan, 2013).

Di sini, reliabilitas kuesioner dievaluasi dengan menggunakan *Cronbach Alpha*, sebuah ukuran statistik. Uji reliabilitas dilakukan terhadap seluruh item pertanyaan secara kolektif. Jika nilai *Cronbach Alpha* melampaui 0,70, artinya kuesioner dianggap reliabel. Apabila diperoleh nilai yang sebaliknya dari ketentuan tersebut maka kuesioner dianggap tidak reliabel (Sujarweni, 2015).

## **Metode Analisis Data**

Di bagian ini akan berisi mengenai penjelasan metode analisis data yang digunakan. Karena model penelitiannya berbentuk kuantitatif maka analisa data merupakan kegiatan kegiatan yang dilakukan apabila telah terkumpulnya data dari responden. Adapun penjelasan dari analisa data kuantitatif sebagaimana di bawah ini:

1. Analisis Data Kuantitatif

Analisis ini merupakan karakteristik analisa dengan datanya berupa numerik (Sugiyono, 2016). Proses analisa dibantu dengan program SPSS versi 22. Kegiatan menganalisa bertujuan untuk menyusun serta menginterprestasikan data.

1. Alat Analisis Data
2. Uji Asumsi Klasik

Pengujian tipe ini digunakan agar dapat memenuhi prasyarat analisis regresi linear. Selain itu, juga melihat kesesuain model terhadap kenyataan. Maka syarat-syarat berikut ini perlu dipenuhi sehingga model peramalannya menjadi valid, antara lain:

1. Uji Normalitas

Ghozali (2018) menyebutkan tahap yang demikian ini adalah langkah penting bagi analisis regresi, karena memastikan bahwa residual (perbedaan antara nilai yang diamati dan yang diprediksi) mengikuti distribusi normal. Urgensinya ialah dikarenakan pengujian uji-t dan uji F bergantung pada asumsi ini. Model pengujian ini berguna dalam menentukan pendistribusian residual normal atau tidak dengan membandingkannya dengan distribusi normal menggunakan uji statistik dan analisis grafis. Apabila residual tersebar secara normal maka residual akan mendekati nilai rata-rata dan membentuk kurva berbentuk lonceng ketika diplot dalam histogram.

Jika hasil pengujian normalitas menunjukkan bahwa residual tidak tersebar normal maka hal ini dapat secara signifikan memengaruhi keandalan hasil uji statistik. Ketidaknormalan ini sering kali disebabkan oleh adanya nilai ekstrem dalam data. Nilai ekstrim ini dapat muncul dari kesalahan dalam proses pengambilan sampel, penginputan data, atau karakteristik data itu sendiri yang berbeda secara signifikan dengan nilai rata-ratanya. Pengujian ini memakan uji statistik *one-sample Kolmogorov-Smirnov* sebagai pendeteksi residual sehingga bisa dilihat bagaimana pendistribusian datanya (Ghozali, 2018)*.*

Keputusan terhadap terdistribusi normal ataupun tidak ditentukan berdasarkan *asymp. Sig. (2-tailed)* 5%. Apabila angka signifikansi > *alpha* 0,05 artinya data tersebar sebagaimana mestinya. Sebaliknya, jika nilai signifikan < *alpha* 0,05 maka data tidak terdistribusi sebagaimana mestinya (Ghozali, 2018).

1. Uji Multikolinieritas

Ini dirancang guna mengidentifikasi sebuah model regresi menunjukkan keterhubungan sempurna di antara variabel-variabel bebasnya. Atau tidak Pada model yang memiliki korelasi seperti ini, dikatakan terdapat gejala multikolinearitas. (Suliyanto, 2011).

Untuk mendiagnosa gejala ini, peneliti memeriksa nilai *Tolerance* (TOL) serta *Variance Inflation Factor* (VIF) untuk masing-masing variabel independen. Secara spesifik, jika angka TOL melampaui 0,10 atau nilai VIF berads di bawah 10, artinya model dianggap terbebas dari masalah multikolinieritas (Suliyanto, 2011).

1. Uji Heteroskedastisitas

Pengujian yang demikian memiliki arah agar mengetahui apakah varians residual antarpengamatan konsisten atau tidak. Apabila varians konsisten, maka disebut homoskedastisitas, sedangkan jika bervariasi dinamakan heteroskedastisitas (Ghozali, 2018).

Pengujiannya digunakan uji *glejser.* Fondasi dalam pengambilan keputusan untuk pengujian ini jika angka signifikansinya melampaui 0,05 akan dapat diketahui bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Akan tetapi, jika angka sign di bawah 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa terdapat gejala heteroskedastisitas. (Ghozali, 2018).

1. Uji Regresi Linear Berganda

Uji ini merupakan suatu model yang bertujuan dalam meramal naik turunnya variable terikat. Analisis ini dapat digunakan apabila variabel bebas lebih dari satu (Sugiyono, 2018).

Persamaannya ialah sebagaimana berikut ini:

Y = α + β1X1+ β2X2+ β3X3+ β4X4+ β5X5+€

Keterangan:

Y: Variabel Efektivitas Pengelolaan BMD

α : Konstanta

β1 : Koefisien Variabel Kualitas Aparatur Daerah

X1: Variabel Kualitas Aparatur Daerah

β2 : Koefisien Variabel Regulasi BMD

X2: Variabel Regulasi BMD

β3 : Koefisien Variabel Pengendalian Internal

X3: Variabel Pengendalian Internal

β4 : Koefisien Variabel Komitmen Organisasi

X4: Variabel Komitmen Organisasi

β5 : Koefisien Variabel SIMDA-BMD

X5: Variabel SIMDA-BMD

€ : Error

1. Pengujian Hipotesis

Guna melihat keberadaan pengaruh signifikan dari variable bebas dan variable terikat maka diperlukan uji ini. Pengujian yang demikian akan menggunakan uji t juga uji F.

1. Uji F (Uji Kelayakan Model)

Ghozali (2018), menyatakan bahwa tujuan melakukan uji kelayakan model adalah agar dapat melihat ada tidaknya pengaruh variable bebas secara bersamaan untuk variable terikat. Di keadaan di mana variabelnya dilakukan regresi berganda, atau independennya melebihi satu, pengujiannya harus dilaksanakan dengan simultan. Dalam pengujian signifikansi, dampak variable independen untuk variable dependen secara simultan bisa dikethaui menggunakan Uji F. Uji F dilaksanakan dalam melihat variable bebas dapat atau tidak menjelaskan berubahnya nilai variable terikatnya. Pengujian model fit (tepat) atau tidak menggunakan nilai F. Sehingga uji F dapat membantu menentukan apakah model tersebut layak dipertahankan.

Dengan signifikan (α) = 0,05 serta *df* = n-k dimana n adalah jumlah responden dan k merupakan jumlah variabel independen.

Penerimaan/penolakan hipotesa di pengujian ini merujuk pada ketentuan di bawah ini:

1. Apabila Fhitung < Ftabel. Ini sama juga dengan nilai signifikan > 0,05. Keadaan yang demikian berarti hipotesis diterima. Ini menunjukan fakta variable bebas tidak memiliki pengaruh nyata untuk variable terikat.
2. Apabila Fhitung > Ftabel. Ini sama juga dengan nilai signifikan < 0,05. Keadaan yang demikian berarti hipotesis ditolak. Ini menunjukan fakta variable bebas memiliki pengaruh nyata untuk variable terikat.
3. Uji t

Ghozali (2018), menjelaskan pengujian statisik t menunjukan kekuatan variable bebas secara individu mampu menjelaskan variasi variable dependen. Cara yang diambil dalam pengujian ini adalah melalui penggunaan *significance level* 0,05 (*alpha* = 0,05). Selain itu, juga melalui penggunaan *df* = n-k. Keterangan masing—masing n dan k ialah jumlah serta jumlah variable independen.

Penerimaan/penolakan hipotesa dalam uji t ini didasarkan dengan merujuk ketentuan di bawah ini:

1. Apabila thitung < ttabel. Ini sama juga dengan nilai signifikan > 0,05. Keadaan yang demikian berarti hipotesis ditolak. Ini menunjukan fakta variable bebas (sendiri-sendiri) tidak memiliki pengaruh nyata untuk variable terikat.
2. Apabila thitung > ttabel. Ini sama juga dengan nilai signifikan < 0,05. Keadaan yang demikian berarti hipotesis diterima. Ini menunjukan fakta variable bebas (sendiri-sendiri) memiliki pengaruh nyata untuk variable terikat.
3. Koefisien Determinasi (R2)

ini dijelaskan sebaai suatu angka yang menunjukkan sejauh mana model yang dipergunakan mampu menjelaskan berbagai variable terikat. Koefisien ini memiliki nilai antara 0 dan 1. Apabila ditunjukkan dalam suatu hasil bahwa R2=1, ini menjelaskan 100% total varian mampu dijelaskan oleh variable bebasnya. Tiap-tiap variable X1 atau X2 mampu menjelaskan varaibel Y dengan sempurna. Begitu pula dengan nilai sebaliknya, jika R2=0 menerangkan bahwasannya tidak ditemukan adanya kemampuan variable independent menjelaskan total varian. Tiap-tiap variable X1 atau X2 tidak mampu menjelaskan varaible Y (Ghozali, 2018)